



**STRATEGI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BERBASIS
POTENSI LOKAL CANDI PLAOSAN MELALUI PROGRAM
DESA WISATA UNTUK KEMANDIRIAN EKONOMI DI DESA
BUGISAN KECAMATAN PRAMBANAN KABUPATEN
KLATEN**

SKRIPSI

**Disajikan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana
Pendidikan**

Program Studi Pendidikan Luar Sekolah

Oleh

Fitra Ayuningtyas Hidayatullah

1201415006

**JURUSAN PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**

2019

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Telah disetujui skripsi dengan judul “Strategi Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Potensi Lokal Melalui Program Desa Wisata Untuk Kemandirian Ekonomi Di Desa Bugisan Kecamatan Prambanan Kabupaten Klaten” untuk diajukan di sidang panitia ujian skripsi Jurusan Pendidikan Luar Sekolah Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Semarang pada :

Hari : Selasa

Tanggal : 29 Oktober 2019

Mengetahui,

Ketua Jurusan Pendidikan

Luar Sekolah



Dr. Mintarsih Arharini, M.Pd

NIP. 196801211993032002

Menyetujui,

Dosen Pembimbing



Dr. Tri Suminar, M.Pd

NIP.196705261995122001

PERNYATAAN

Saya menyatakan dengan ini bahwa skripsi yang berjudul “Strategi Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Potensi Lokal Melalui Program Desa Wisata Untuk Kemandirian Ekonomi Di Desa Bugisan Kecamatan Prambanan Kabupaten Klaten”, merupakan karya sendiri yang telah melalui proses observasi, penelitian, dan bimbingan. Pendapat atau temuan orang lain yang terdapat dalam skripsi ini dikutip atau dirujuk berdasarkan kode etik ilmiah. Semua kutipan baik langsung maupun tidak langsung telah disertai keterangan identitas sumbernya dengan cara sebagaimana mestinya dalam penulisan karya ilmiah. Atas pernyataan ini, saya bersedia untuk bertanggung jawab atas segala resiko terhadap keaslian karya saya

Semarang, 20 Oktober 2019

Pembuat Pernyataan



Fitra Ayuningtyas H

HALAMAN PENGESAHAN


Skripsi dengan judul “Strategi Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Potensi Lokal Candi Plaosan Melalui Program Desa Wisata Untuk Kemandirian Ekonomi Di Desa Bugisan Kecamatan Prambanan Kabupaten Klaten” telah dipertahankan di hadapan sidang panitia ujian skripsi Jurusan Pendidikan Luar Sekolah Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Semarang.

Hari : Selasa


Tanggal : 29 Oktober 2019


Ketua
Dr. Euy Purwanto, M.Si
NIP.196361211987030001

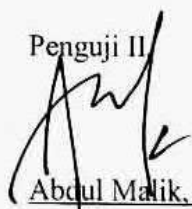
Sekretaris,


Bagus Kisworo, S.Pd, M.Pd
NIP.197911302006041005

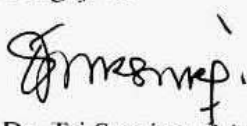
Penguji I,


Dr. Sungkowo Edy Mulyono, M.Si
NIP.196807042005011001

Penguji II


Abdul Malik, S.Pd, M.Pd
NIP. 198103102015041004

Penguji III


Dr. Tri Suminar, M.Pd
NIP. 196705261995122001

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto

Daripada mengutuk kegelapan, mari nyalakan lilin sebagai sebuah penerangan.

“Sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan mereka sendiri” (Ar-Ra’d:11)

Persembahan

Skripsi ini saya persembahkan untuk :

1. Orang tua saya Bapak Sukardi dan Ibu Murni yang menjadi sumber kebahagiaan, kekuatan, kasih sayang, dan doa.
2. Kakek Setu Heru Binarto dan Nenek Sriyati yang telah mendoakan dan selalu mendukung.
3. Kekasihku, Ditho Aditya Setyawan yang selalu memberikan dukungan dan menjadi teman yang paling spesial.
4. Teman-teman sekolah, Isniani, Tri Wulandari, Kak Nisa Novita Rahayu, dan Kak Fatati Muarifah.
5. Teman-teman seperjuangan, Hana Rahmawati, Sari Arum Lestari, Ema Dwi Cahyani, Nurul Puspita, Nadhiya Pangestika, Puput Faiqoh, dan Popon Aryani yang sering kebersamai selama perkuliahan.
6. Teman-teman Pendidikan Luar Sekolah angkatan 2015.
7. Almamaterku Universitas Negeri Semarang.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rizki, rahmat dan hidayah, sehingga penyusunan skripsi yang berjudul “Strategi Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Potensi Lokal Candi Plaosan Melalui Program Desa Wisata Untuk Kemandirian Ekonomi Di Desa Bugisan Kecamatan Prambanan Kabupaten Klaten” dapat diselesaikan dengan baik dan lancar. Maksud penyusunan skripsi ini adalah untuk memenuhi penyelesaian studi strata satu guna memperoleh gelar Sarjana Pendidikan pada jurusan Pendidikan Luar Sekolah, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Semarang.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini dari awal hingga akhir tidak terlepas dari bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih yang setulusnya kepada:

1. Dr. Ahmad Rifai RC., M.Pd., Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Semarang yang telah memberikan ijin penelitian sehingga dapat melakukan penelitian ini dengan lancar.
2. Dr. Mintarsih Arbarini, M.Pd selaku Ketua Jurusan Pendidikan Luar Sekolah yang telah memberikan izin penelitian.
3. Dr. Tri Suminar, M.Pd selaku Dosen Wali dan Dosen Pembimbing yang senantiasa memberikan motivasi dan bimbingan untuk menyelesaikan skripsi.
4. Bapak dan Ibu Dosen Pendidikan Luar Sekolah yang senantiasa memberikan ilmu dan inspirasi selama perkuliahan
5. Segenap Karyawan Fakultas Ilmu Pendidikan terkhusus Bapak Purwanto yang telah membantu dan melayani dengan baik.
6. Bapak Heru Nugroho selaku Kepala Desa Bugisan beserta jajaran yang telah memberikan banyak bantuan, informasi dan data dari awal penelitian sampai selesai.
7. Heri Kiswanto Kepala Dusun II yang telah membantu dalam memberikan informasi selama proses penelitian.

8. BUMDes Rukun Santoso dan Kelompok Sadar Wisata Desa Bugisan yang telah memberikan informasi dalam penelitian
9. Masyarakat Desa Bugisan yang telah memberikan informasi dalam penelitian.
10. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, yang secara langsung maupun tidak langsung dalam membantu penulisan skripsi ini.

Penulis meyakini bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Untuk itu, kritik dan saran konstruktif penulis harapkan demi kemajuan yang lebih baik. semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi peneliti dan semua pihak

Semarang, 20 Oktober 2019

Fitra Ayuningtyas H
1201415006

ABSTRAK

Hidayatullah, Fitra Ayuningtyas. 2019. “*Strategi Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Potensi Lokal Melalui Program Desa Wisata Untuk Kemandirian Ekonomi Di Desa Bugisan Kecamatan Prambanan Kabupaten Klaten*” Skripsi, Jurusan Pendidikan Luar Sekolah Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Semarang. Dosen Pembimbing : Dr. Tri Suminar, M.Pd.

Kata Kunci : Pemberdayaan, Potensi Lokal, Desa Wisata, Kemandirian, Ekonomi

Desa Wisata Bugisan dilatarbelakangi oleh potensi lokal yaitu budaya kesenian dan terdapat situs sejarah Candi Plaosan sebagai destinasi wisata budaya. Dengan adanya BUMDes dan Pokdarwis maka berdiri Desa Wisata Bugisan untuk memanfaatkan potensi lokal dan pemberdayaan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan strategi pemberdayaan masyarakat, pelaksanaan pemberdayaan masyarakat, faktor pendukung dan penghambat pemberdayaan, dan keberhasilan pemberdayaan masyarakat Desa Wisata.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif kualitatif. Subjek penelitian berjumlah 2 orang yaitu pengurus BUMDes dan Pokdarwis dengan informan berjumlah 4 orang. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik keabsahan menggunakan triangulasi sumber. Teknik analisis data dalam penelitian menggunakan: (1) pengumpulan data, (2) reduksi data, (3) penyajian data, dan (4) penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) strategi pemberdayaan menggunakan lima tahap yaitu pengembangan SDM melalui pelatihan, seminar, dan studi banding. Pengembangan kelembagaan kelompok melalui kerjasama BUMDes dan Pokdarwis. Pemupukan modal masyarakat dari dana desa, pendapatan asli desa selain itu juga dengan adanya modal sosial. Pengembangan usaha produktif yang dimiliki BUMDes yaitu dari paseban candi kembar dan *car free day* serta promosi usaha kecil menengah masyarakat. Penyediaan informasi tepat guna melalui brosur, pamflet, promosi sosial media dan website. (2) Pelaksanaan pemberdayaan melalui tiga tahap yaitu tahap penyadaran berupa kegiatan sosialisai, tahap transformasi berupa adanya kemandirian, desa lebih dikenal dan lingkungan lebih baik, tahap pengayaan berupa keberlanjutan program dan rencana pengembangan adanya inovasi kuliner papaya california. (3) Faktor pendukung pemberdayaan yaitu partisipasi masyarakat dan dukungan dari UGM, ISI Surakarta, Dinas Pariwisata, PT. TWC. Faktor penghambat yaitu masyarakat yang belum sadar wisata. (4) Keberhasilan bidang ekonomi berdasarkan pekerjaan dan pendapatan masyarakat yang meningkat, keberhasilan bidang sosial yaitu terjalin kerjasama yang baik dengan berbagai pihak, keberhasilan budaya yaitu pelestarian budaya.

Simpulan hasil penelitian pemberdayaan masyarakat berbasis potensi lokal yaitu dengan strategi pengembangan SDM melalui tahap penyadaran, transformasi, dan pengayaan untuk kemandirian ekonomi. Saran pemerintah lebih banyak mengadakan pengembangan SDM untuk peningkatan keterampilan.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PERNYATAAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	14
1.3 Tujuan Penelitian	14
1.4 Manfaat Penelitian	15
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	17
2.1 Pemberdayaan Masyarakat	17
2.2 Potensi Lokal	45
2.3 Desa Wisata	51
2.4 Kemandirian.....	55
2.5 Penelitian Relevan	59
2.6 Kerangka Pikir	61
BAB III METODE PENELITIAN	64
3.1 Desain Penelitian	64
3.2 Lokasi Penelitian.....	66
3.3 Fokus Penelitian.....	66
3.4 Subjek Penelitian	67
3.5 Sumber Data.....	67
3.6 Teknik Pengumpulan Data.....	68

3.7	Teknik Keabsahan Data	71
3.8	Teknik Analisis Data.....	73
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		75
4.1	Gambaran Umum Hasil Penelitian	75
4.2	Deskripsi Hasil Penelitian.....	97
4.3	Pembahasan.....	116
BAB V PENUTUP		129
5.1	Simpulan	129
5.2	Saran	132
DAFTAR PUSTAKA		133
LAMPIRAN.....		138

DAFTAR TABEL

4.1 Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan	79
4.2 Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian	80
4.3 Jumlah Penduduk Menurut Agama	81
4.4 Jumlah Pengunjung Candi Plaosan	96

DAFTAR GAMBAR

2.1 Skema Kerangka Berfikir	66
4.1 Peta Desa Bugisan	78
4.2 Struktur Organisasi Pemerintah Desa Bugisan	83
4.3 Struktur Organisasi Pengurus Desa Wisata	92
4.4 Statistik Pengunjung Candi Plaosan	96

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Kisi-Kisi Instrumen Penelitian	140
Lampiran 2. Kisi-Kisi Pedoman Wawancara.....	142
Lampiran 3. Kisi-Kisi Pedoman Observasi.....	144
Lampiran 4. Kisi-Kisi Pedoman Dokumentasi.....	146
Lampiran 5. Pedoman Wawancara	147
Lampiran 6. Transkrip Wawancara.....	165
Lampiran 7. Hasil Observasi.....	222
Lampiran 8. Catatan Lapangan.....	226
Lampiran 9. Pedoman Dokumentasi.....	235

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki banyak keanekaragaman pada setiap daerah. Keanekaragaman tersebut memiliki berbagai ciri khas pada masing-masing daerah yang ada di Indonesia. Keanekaragaman tersebut dapat dijadikan sebagai potensi yang dapat dikembangkan sebagai pariwisata yang dapat menarik wisatawan seperti wisata alam, wisata religi, wisata kuliner, wisata sejarah. Potensi Indonesia yang sangat melimpah dapat dijadikan sebagai daya tarik wisata nasional maupun internasional.

Indonesia terkenal memiliki banyak potensi wisata yang beraneka ragam, mulai dari wisata alam yang berupa pantai, pegunungan, sungai, wisata sejarah berupa candi dan petilasan yang terkenal baik ditingkat nasional maupun internasional. Hal ini karena kondisi geografis Indonesia yaitu negara kepulauan yang berada diantara samudera pasifik dan samudera hindia sehingga menciptakan nuansa alam yang mempesona sebagai salah satu daya tarik wisata. Selain itu Indonesia juga dikenal kaya akan berbagai macam budaya warisan leluhur yang masih sangat kental. Hal itu menjadi salah satu keuntungan bagi Indonesia untuk mengembangkan bidang pariwisata dengan memanfaatkan potensi budaya sebagai sebuah ciri khas. Potensi lokal adalah kekayaan alam, budaya, dan SDM pada suatu daerah. Potensi alam di suatu daerah bergantung pada kondisi geografis, iklim, dan bentang alam daerah tersebut. Kondisi alam

yang berbeda tersebut menyebabkan perbedaan dan ciri khas potensi lokal setiap wilayah. Kekhasan bentang alam, perilaku dan budaya masyarakat setempat, dan kesejahteraan masyarakat membentuk segitiga interaksi yang saling berkaitan.

Potensi alam dan budaya yang dimiliki memberikan dampak positif bagi pembukaan lapangan pekerjaan baru dan peningkatan kesejahteraan ekonomi. Di mana setelah banyaknya ketertarikan wisatawan khususnya wisatawan mancanegara terhadap nuansa alami pedesaan. (Sutarto, dkk, 2018:29). Soleh (2017:23) mendefinisikan potensi adalah daya, kekuatan, kesanggupan dan kemampuan yang mempunyai kemungkinan untuk dapat dikembangkan. Jadi Potensi desa adalah daya, kekuatan, kesanggupan dan kemampuan yang dimiliki oleh suatu desa yang mempunyai kemungkinan untuk dapat dikembangkan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sedangkan dalam penelitian (Noor, 2018:36) potensi lokal adalah kemampuan/kekuatan/daya yang dimiliki oleh suatu daerah atau tempat yang dapat dikembangkan untuk menghasilkan manfaat/keuntungan bagi suatu daerah. Akan tetapi keanekaragaman dan potensi belum mampu membebaskan Indonesia dari masalah kemiskinan.

Menurut data BPS persentase penduduk miskin pada September 2018 sebesar 9,66 persen menurun 0,16 persen poin terhadap Maret 2018 dan menurun 0,46 persen poin terhadap September 2017. Jumlah penduduk miskin pada September 2018 sebesar 25,67 juta orang menurun 0,28 juta orang terhadap Maret 2018 dan menurun 0,91 juta orang terhadap September 2017. Persentase penduduk miskin di daerah perkotaan pada Maret 2018 sebesar 7,02 persen, turun menjadi

6,89 persen pada September 2018. Sementara persentase penduduk miskin di daerah pedesaan pada Maret 2018 sebesar 13,20 persen, turun menjadi 13,10 persen pada September 2018. Dibanding Maret 2018 jumlah penduduk miskin September 2018 di daerah perkotaan turun sebanyak 13,1 ribu orang (dari 10,14 juta orang pada Maret 2018 menjadi 10,13 juta orang pada September 2018). Sementara itu daerah pedesaan turun sebanyak 262,1 ribu orang (dari 15,81 juta orang pada Maret 2018 menjadi 15,54 juta orang pada September 2018). Garis Kemiskinan pada September 2018 tercatat sebesar Rp 410.670,- /kapita/bulan dengan komposisi Garis Kemiskinan Makanan sebesar Rp 302.022,- (73,54 persen) dan Garis Kemiskinan Bukan Makanan sebesar Rp 108.648,- (26,46 persen). Pada September 2018 secara rata-rata rumah tangga miskin di Indonesia memiliki 4,63 orang anggota rumah tangga. Dengan demikian besarnya Garis Kemiskinan per rumah tangga miskin secara rata-rata adalah sebesar Rp 1.901.402,-/rumah tangga miskin/bulan. Berdasarkan data tersebut maka dapat ditegaskan presentase penduduk miskin di desa lebih banyak daripada penduduk miskin di kota. Keadaan demikian yang perlu mendapat perhatian khusus dari pemerintah untuk berupaya mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya wilayah pedesaan.

Bank Dunia mendefinisikan kemiskinan sebagai *Poverty is concern with absolute standart of living of part of society the poor in equality refers to relative living standart across the whole society*. Kemiskinan adalah terkait batas absolut standar hidup masyarakat miskin. Dengan demikian maka kemiskinan menyangkut standar hidup relatif dari masyarakat (Sulistiyani, 2004:17). Kemiskinan

merupakan fenomena yang masih sulit dipecahkan oleh bangsa Indonesia. Kemiskinan memunculkan berbagai masalah seperti pengangguran, kelaparan, kesenjangan sosial, kesehatan, dan kriminalitas (Mulyono, 2017:5).

Menurut pendapat (Raharjo, dkk, 2016:26-29) dalam jurnal menyatakan bahwa kemiskinan akan berkurang karena warga masyarakat mampu memperoleh kebutuhan yang mereka butuhkan yang mampu diakses dengan sangat terjangkau. Kemiskinan muncul karena ketidakberdayaan mengakses yang menjadi sesuatu yang dibutuhkan. Dengan keberdayaan itulah tingkat kemiskinan akan berkurang. Sebagaimana dikemukakan oleh (Mulyadi, 2016: 224) menyatakan bahwa kemiskinan, pada kenyataannya, lebih dilihat dari sudut pandang ekonomi semata. Batasan kemiskinan adalah suatu kondisi di mana orang tidak mempunyai harta benda atau mempunyai pendapatan di bawah batasan nominal tertentu. Tingkatan kemiskinan dinilai atau ditentukan berdasarkan ukuran-ukuran materi, seperti: kondisi fisik dari bangunan atau lingkungan permukiman.

Penyebab kemiskinan di desa salah satunya dilatar belakangi oleh mobilitas penduduk desa ke kota, akibatnya kurangnya lapangan pekerjaan di desa. Ketidakmerataan pembangunan di kawasan perdesaan selalu menjadi alasan utama yang mendorong tingkat urbanisasi masyarakat. Bahkan banyak orang yang terdidik lebih tertarik di kota dan meninggalkan kampung halamannya. Hal ini menjadi permasalahan bagi desa yang ditinggalkan, orang yang terampil lebih memilih bekerja di kota karena lebih memiliki peluang yang baik dan menjadikan desa menjadi sepi dan kurang produktif.

Adisasmita dalam (Mu'arifuddin, dkk, 2016:58) bahwa pembangunan desa adalah seluruh kegiatan pembangunan yang berlangsung di desa meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat, serta dilaksanakan secara terpadu dengan mengembangkan swadaya gotong royong. Tujuan yang ingin dicapai tentunya meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa berdasarkan kemampuan dan potensi Sumber Daya Alam (SDA) mereka, melalui peningkatan kualitas hidup, keterampilan dan prakarsa masyarakat dengan adanya Sumber Daya Manusia (SDM)

Berdasarkan UU Desa No. 6 Tahun 2014 menyebutkan bahwa desa memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dan berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa perjalanan ketatanegaraan Republik Indonesia, Desa telah berkembang dalam berbagai bentuk sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Kenyataannya masih banyak desa yang jauh dari apa yang ada dalam jaminan UU Desa, masih banyak desa yang dibilang tertinggal baik dalam bidang pembangunan, pendidikan maupun teknologi, sehingga sangat diperlukan jaminan untuk mewujudkan desa yang sejahtera dan mandiri sesuai dalam UU Desa No.6 tahun 2014

Dalam mewujudkan UU Desa No.6 Tahun 2014 sebagai salah satu langkah konkrit yang dapat dilakukan adalah memanfaatkan potensi alam dan potensi

sumber daya manusia yang ada di desa itu sendiri seperti misalnya menjadikan desa sebagai destinasi pariwisata. Menurut Oka A Yati (2008:2) prospek industri pariwisata di Indonesia sangat besar dan menggembirakan mengingat pariwisata dianggap sebagai penyelamat, primadona, penghasil devisa bagi negara. Peran pemerintah dalam upaya pemberdayaan masyarakat di bidang kepariwisataan tertuang dalam UU No. 10 Tahun 2009 pengganti UU No. 9 Tahun 1990 tentang kepariwisataan yang menyebutkan bahwa dampak yang diakibatkan dari pengembangan kepariwisataan berupa peningkatan kesejahteraan masyarakat, pengurangan angka kemiskinan dan pengangguran, serta pelestarian lingkungan.

Dilihat dari letak geografisnya, Indonesia merupakan negara kepulauan yang kaya akan sumber daya alam. Hal ini merupakan modal untuk mengembangkan industri pariwisata dengan memanfaatkan potensi alam dan budaya yang besar. Pemandangan alam gunung, lembah, air terjun, hutan, sungai, danau, goa, dan pantai merupakan sumber daya alam yang memiliki potensi besar untuk area wisata alam. Dengan demikian, perekonomian negara dapat meningkat seiring meningkatnya sektor pariwisata (Fandeli, 1995:7)

Pariwisata merupakan suatu industri yang banyak menghasilkan devisa bagi negara, sehingga pemerintah berusaha untuk meningkatkan sektor ini dengan mengambil langkah-langkah kebijaksanaan pembangunan pariwisata. Ada beberapa faktor yang mendorong pengembangan pariwisata. Pertama, wilayah pedesaan memiliki potensi alam dan budaya yang relatif lebih otentik daripada wilayah perkotaan, masyarakat pedesaan masih menjalankan tradisi dan ritual-ritual budaya dan topografi yang cukup serasi. Kedua, wilayah pedesaan memiliki

lingkungan fisik yang relatif masih asli atau belum banyak tercemar oleh ragam jenis polusi dibandingkan dengan kawasan perkotaan. Ketiga, dalam tingkat tertentu daerah pedesaan menghadapi perkembangan ekonomi yang relatif lambat, sehingga pemanfaatan potensi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat lokal secara optimal merupakan alasan rasional dalam pengembangan pariwisata pedesaan (Damanaik & Janianton, 2013: 69).

Pariwisata berbasis masyarakat sebagai sebuah pendekatan pemberdayaan yang melibatkan dan meletakkan masyarakat sebagai pelaku penting dalam konteks paradigma baru pembangunan yakni pembangunan yang berkelanjutan (*sustainable development paradigma*) pariwisata berbasis masyarakat merupakan peluang untuk menggerakkan segenap potensi dan dinamika masyarakat, guna mengimbangi peran pelaku usaha pariwisata skala besar. Pariwisata berbasis masyarakat tidak berarti merupakan upaya kecil dan lokal semata, tetapi perlu diletakkan dalam konteks kerjasama masyarakat secara global. Dari beberapa ulasan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa pariwisata berbasis masyarakat adalah pariwisata dimana masyarakat atau warga setempat memainkan peranan penting dan utama dalam pengambilan keputusan mempengaruhi dan memberi manfaat terhadap kehidupan dan lingkungan mereka (Usman, 2008:56).

Konsep pariwisata berbasis masyarakat terkandung didalamnya adalah konsep pemberdayaan masyarakat, upaya pemberdayaan masyarakat pada hakikatnya selalu dihubungkan dengan karakteristik sasaran sebagai suatu komunitas yang mempunyai ciri, latar belakang, dan pemberdayaan masyarakat, yang terpenting adalah dimulai dengan bagaimana cara menciptakan kondisi

suasana, atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat untuk berkembang. Mayoritas masyarakat di pedesaan menggantungkan hidupnya dari hasil potensi alam yang ada di daerahnya. Potensi alam tersebut yang kemudian akan dikelola oleh sumberdaya masyarakat untuk dijadikan sebagai sumber penghasilan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi masyarakat. Dengan adanya potensi lokal maka untuk mengoptimalkan pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya manusia diperlukan pemberdayaan masyarakat untuk kemandirian ekonomi di suatu daerah.

Dalam jurnal internasional (Sutawa, 2012:419) menyatakan:

“Community empowerment is a main key in order to develop community welfare through tourism. Community empowerment is also a requirement to develop sustainable tourism. Village tourism development as one of community empowerment’s from in tourism need to be continued with any othe empowerment and there is an important thing also to be done i.e. development on tourism knowledge for community and tourism stakeholders personnel in conjunction with the importance of sustainable tourism development.”

Yang artinya pemberdayaan masyarakat merupakan kunci utama dalam rangka untuk mengembangkan kesejahteraan masyarakat melalui pariwisata. Pemberdayaan masyarakat juga merupakan persyaratan untuk mengembangkan pariwisata berkelanjutan. Pengembangan desa wisata sebagai salah satu pemberdayaan masyarakat berbasis pariwisata yang perlu dilanjutkan dengan pemberdayaan lain yang patut dan ada hal penting juga untuk dilakukan yaitu pengembangan pengetahuan pariwisata bagi masyarakat dan pariwisata pemangku kepentingan personel dalam hubungannya dengan pentingnya pembangunan pariwisata berkelanjutan.

Pemberdayaan masyarakat sebagai terjemahan dari kata *empowerment* mulai ramai digunakan dalam bahasa sehari-hari di Indonesia bersama-sama

dengan istilah “pengentasan kemiskinan” (*poverty alleviation*) sejak digulirkannya Program Inpres No.5/1993 yang kemudian dikenal sebagai Input Desa Tertinggal (IDT). Sejak saat itu istilah pemberdayaan dan pengentasan kemiskinan menjadi topik dan kata kunci upaya pembangunan. Hal itu tidak hanya berlaku di Indonesia, bahkan World Bank dalam Bulletinnya Vol.11 No.4/Vol. 2 No.1 Oktober-Desember 2001 telah menetapkan pemberdayaan sebagai salah satu ujung tombak dari Strategi Trisula untuk memerangi kemiskinan yang dilaksanakan sejak memasuki dasawarsa 90-an, yang terdiri dari penggalakan peluang (*promoting opportunity*) fasilitas pemberdayaan (*facilitating empowerment*) dan peningkatan keamanan (*enhancing security*). Istilah pemberdayaan juga dapat diartikan sebagai upaya memenuhi kebutuhan yang diinginkan oleh individu, kelompok, dan masyarakat luas agar mereka memiliki kemampuan untuk melakukan pilihannya dan mengontrol lingkungannya agar dapat memenuhi keinginan-keinginannya, termasuk aksesibilitasnya terhadap sumberdaya yang terkait dengan pekerjaannya, aktivitas sosialnya, dan lain-lain (Mardikanto,2017:28).

Dwiyanto dan Jemadi (2013:37) dalam jurnal mengemukakan pemberdayaan masyarakat merupakan proses untuk masyarakat menjadi berdaya serta menggerakkan kembali kemandirian masyarakat dalam pembangunan di komunitasnya, maka diperlukan dorongan-dorongan atau gagasan awal untuk menyadarkan kembali peran dan posisinya dalam kerangka untuk membangun masyarakat madani. Sedangkan dalam jurnal internasional (Yulong Li & Caroline Hunter, 2015:252) *Community empowerment is a term describing a participative and developmental approach to local decision making, “through which*

marginalized or oppressed community members and groups acquire valued resources and basic rights, and achieve greater control over their lives and environment". Yang artinya pemberdayaan masyarakat adalah istilah yang menggambarkan pendekatan partisipatif dan perkembangan untuk pengambilan keputusan lokal, "melalui mana terpinggirkan atau anggota masyarakat yang tertindas dan kelompok memperoleh sumber daya dihargai dan hak-hak dasar, dan mencapai kontrol yang lebih besar atas hidup mereka dan lingkungan".

Strategi pemberdayaan masyarakat merupakan suatu proses sekaligus produk yang "penting" yang berkaitan dengan pelaksanaan dan pengendalian kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk memenangkan persaingan, demi tercapainya tujuan (Mardikanto, 2017:168) Strategi pemberdayaan masyarakat, pada dasarnya mempunyai tiga arah, yaitu : 1) Pemihakan dan pemberdayaan masyarakat; 2) Pemantapan otonomi dan pendelegasian wewenang dalam pengelolaan pembangunan yang mengembangkan peran serta masyarakat. 3) Modernisasi melalui penajaman arah perubahan struktur sosial ekonomi (termasuk didalamnya kesehatan), budaya dan politik yang bersumber pada partisipasi masyarakat. Ambar Teguh Sulistiyani (2004: 83) mengemukakan bahwa tahap-tahap yang harus dilalui dalam rangka pemberdayaan masyarakat adalah meliputi: 1) tahap penyadaran dan pembentukan perilaku menuju perilaku sadar dan peduli sehingga merasa membutuhkan peningkatan kapasitas diri; 2) tahap transformasi kemampuan berupa wawasan pengetahuan, kecakapan keterampilan agar terbuka wawasan dan memberikan keterampilan dasar sehingga dapat mengambil peran di dalam pembangunan; dan 3) tahap peningkatan kemampuan intelektual, kecakapan-

keterampilan sehingga terbentuklah inisiatif dan kemampuan inovatif untuk mengantarkan pada kemandirian.

Sedangkan Hutomo (2000:7) menyebutkan bahwa kegiatan-kegiatan pemberdayaan masyarakat dapat dikelompokkan ke dalam beberapa kegiatan, yaitu bantuan modal, bantuan pembangunan prasarana, bantuan pendampingan, penguatan kelembagaan dan penguatan kemitraan. Soemarno (2010:2) menyebutkan bahwa suksesnya pembangunan sebuah desa wisata dapat ditempuh melalui upaya-upaya seperti pembangunan SDM, kemitraan, kegiatan pemerintahan di desa, promosi, festival/pertandingan, membina organisasi masyarakat, dan kerja sama dengan universitas.

Kabupaten Klaten dikenal memiliki berbagai potensi sumber daya alam yang bermacam macam. Setiap kecamatan yang ada di kabupaten Klaten memiliki potensi alam dan budaya masing-masing yang dapat dikelola dan dikembangkan oleh masyarakat Klaten sebagai daya tarik wisata yang sangat menguntungkan bagi masyarakat. Hal tersebut merupakan kesempatan untuk memerangi kemiskinan masyarakat dan memberdayakan seluruh masyarakat setempat untuk membangun sebuah desa wisata budaya yang dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.

Kecamatan Prambanan Klaten merupakan salah satu kecamatan yang berada di kabupaten Klaten yang dijadikan sebagai perlintasan antar provinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Desa Bugisan terletak di perbatasan barat kecamatan Prambanan dan berbatasan langsung dengan kabupaten Sleman provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Desa Bugisan letaknya dekat dengan Candi

Prambanan menjadikan lokasi yang sangat strategis untuk pengembangan desa wisata.

Desa Wisata Bugisan Kampung Budaya Candi Plaosan merupakan salah satu desa wisata yang ada di Kabupaten Klaten yang terletak di kecamatan Prambanan memiliki luas wilayah 165.3638 Ha berbatasan sebelah utara desa Kokosan dan desa Kebondalem Lor, sebelah selatan desa Tlogo dan desa Taji, sebelah barat provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, sebelah timur desa Kemudo. Desa Wisata Bugisan sebelumnya mempunyai potensi lokal berupa budaya yaitu banyaknya kesenian yang ada, namun Desa Bugisan dulu belum mampu mewadahi masyarakat dalam mengembangkan potensi budaya tersebut, terlebih lagi dengan adanya situs sejarah Candi Plaosan dan Candi Sewu menjadikan Desa Wisata Bugisan memiliki daya tarik wisata budaya yang perlu dikembangkan. Desa wisata Bugisan didirikan dibawah naungan BUMDes Rukun Santoso pada tahun 2013 dibawah kepemimpinan Kepala Desa Bapak Heru Nugroho. Bugisan dikatakan sebagai desa wisata kampung budaya Candi Plaosan karena potensi yang ada dalam desa tersebut merupakan situs budaya yang memiliki nilai sejarah yang tinggi. Potensi daya tarik wisata terbesar yakni pada Candi Plaosan atau candi kembar yang merupakan candi yang didirikan oleh raja mataram kuno yaitu Rakai Pikatan untuk permaisurinya yaitu Pramodyawardhani. Candi Plaosan mengisahkan kisah cinta beda agama antara Rakai Pikatan dan Pramodyawardhani yang tetap menjaga kesetiannya pada agamanya dan tetap saling mencintai. Candi Plaosan menggambarkan toleransi yang tinggi terhadap umat beragama. Candi Plaosan merupakan candi Buddha yang bernuansa arsitektur Hindu. Dua candi kembar

beserta relief laki-laki dan perempuan melambangkan kesetiaan Rakai Pikatan dan Pramordawardhani.

Desa Wisata Bugisan Kampung Budaya Candi Plaosan dibawah naungan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Rukun Santoso tidak hanya memberdayakan masyarakat melalui desa wisata saja melainkan terdapat berberapa unit usaha untuk peningkatan kesejahteraan dengan menciptakan produktivitas ekonomi bagi desa berdasarkan potensi yang dimiliki. BUMDes memiliki peran yang penting dalam pemberdayaan masyarakat desa dalam pengembangan desa wisata. Unit usaha yang berada dibawah naungan BUMDes yaitu paseban candi kembar, *car free day*, bank sampah, kantin PKK, simpan pinjam perdagangan.

Pemberdayaan masyarakat melalui desa wisata tentunya akan melibatkan seluruh masyarakat, baik dalam kepengurusan maupun ketenagakerjaan untuk berbagai program pemberdayaan sampai terjadi kemandirian masyarakat untuk memanfaatkan peluang ekonomi yang muncul dari adanya desa wisata. Hal ini sejalan dengan konsep pemberdayaan ekonomi masyarakat menurut Sumodiningrat (1999:56) yaitu pemberdayaan ekonomi rakyat merupakan usaha untuk menjadikan ekonomi yang kuat, besar, modern, dan berdaya saing tinggi dalam mekanisme pasar yang benar. Pemberdayaan ekonomi rakyat dilakukan dengan melalui perubahan struktural, yaitu dari ekonomi tradisional ke ekonomi modern, dari ekonomi lemah ke ekonomi kuat, dari ketergantungan menjadi ke kemandirian. Kebijakan yang perlu dilakukan dalam pemberdayaan ekonomi diantaranya adalah, pemberian peluang kepada aset produksi, penguatan industri kecil, mendorong

munculnya wirausaha baru, dan memperkuat posisi transaksi kemitraan usaha ekonomi rakyat (Sumodiningrat, 1999:56).

Dengan mempertimbangkan potensi serta aktivitas dalam kegiatan pemberdayaan melalui desa wisata maka peneliti tertarik untuk meneliti dan mengkaji tentang **Strategi Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Potensi Lokal Candi Plaosan Melalui Program Desa Wisata Untuk Kemandirian Ekonomi Di Desa Bugisan Kecamatan Prambanan Kabupaten Klaten.**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1.2.1 Bagaimana strategi pemberdayaan masyarakat berbasis potensi lokal Candi Plaosan melalui desa wisata untuk kemandirian ekonomi di Desa Bugisan?

1.2.2 Bagaimana pelaksanaan pemberdayaan masyarakat berbasis potensi lokal Candi Plaosan melalui desa wisata untuk kemandirian ekonomi di Desa Bugisan?

1.2.3 Apa saja faktor pendukung dan penghambat pemberdayaan masyarakat berbasis potensi lokal Candi Plaosan melalui desa wisata untuk kemandirian ekonomi di Desa Bugisan?

1.2.4 Bagaimana keberhasilan pemberdayaan masyarakat berbasis potensi lokal Candi Plaosan melalui desa wisata untuk kemandirian ekonomi di Desa Bugisan?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas penelitian ini dilakukan dengan tujuan :

- 1.3.1 Untuk mendeskripsikan strategi pemberdayaan masyarakat berbasis potensi lokal Candi Plaosan melalui desa wisata untuk kemandirian ekonomi di Desa Bugisan.
- 1.3.2 Untuk mendeskripsikan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat berbasis potensi lokal Candi Plaosan melalui desa wisata untuk kemandirian ekonomi di Desa Bugisan
- 1.3.3 Untuk mendeskripsikan faktor pendukung dan penghambat pemberdayaan masyarakat berbasis potensi lokal Candi Plaosan melalui desa wisata untuk kemandirian ekonomi di Desa Bugisan.
- 1.3.4 Untuk mendeskripsikan keberhasilan pemberdayaan masyarakat berbasis potensi lokal Candi Plaosan melalui desa wisata untuk kemandirian ekonomi di Desa Bugisan.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan bahan referensi untuk penelitian lanjutan terkait dengan tema dan topik dalam penelitian yang serupa. Serta menambah wawasan serta pemahaman terhadap kajian Pendidikan Luar Sekolah tentang pemberdayaan masyarakat untuk pengembangan potensi daerah dan pengentasan kemiskinan.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Masyarakat

Penelitian ini dapat memberikan informasi kepada berbagai pihak mengenai strategi pemberdayaan masyarakat berbasis potensi lokal Candi Plaosan melalui program desa wisata untuk kemandirian ekonomi di Desa Bugisan Kecamatan Prambanan Kabupaten Klaten.

b. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan yang berkaitan dengan kajian ilmu Pendidikan Luar Sekolah tentang strategi pemberdayaan masyarakat berbasis potensi lokal Candi Plaosan melalui program desa wisata untuk kemandirian ekonomi di Desa Bugisan Kecamatan Prambanan Kabupaten Klaten sebagai syarat untuk memenuhi tugas akhir skripsi.

c. Bagi Jurusan

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai tambahan informasi dan referensi acuan penelitian berikutnya oleh mahasiswa Pendidikan Luar Sekolah tentang strategi pemberdayaan masyarakat berbasis potensi lokal melalui program desa wisata untuk kemandirian ekonomi.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Pemberdayaan Masyarakat

2.1.1 Pengertian Pemberdayaan Masyarakat

Menurut Sulistiyani (2004:77) secara etimologis pemberdayaan berasal dari kata “daya” berarti kekuatan atau kemampuan. Bertolak dari pengertian tersebut, maka pemberdayaan dapat dimaknai sebagai suatu proses menuju berdaya, atau proses untuk memperoleh daya/kekuatan, dan atau proses pemberian daya/kekuatan dari pihak yang memiliki daya kepada pihak yang kurang atau belum berdaya. Berkenaan dengan pemaknaan konsep pemberdayaan masyarakat, menurut Winarni dalam (Sulistiyani, 2004:79) mengungkapkan bahwa inti dari pemberdayaan adalah meliputi tiga hal, yaitu pengembangan (*enabling*), memperkuat potensi atau daya (*empowering*), terciptanya kemandirian. Bertolak dari pendapat tersebut, berarti pemberdayaan tidak saja terjadi pada masyarakat yang tidak memiliki kemampuan, akan tetapi pada masyarakat yang memiliki daya yang masih terbatas, dapat dikembangkan hingga mencapai kemandirian.

Chambers dalam buku (Kartasasmita, 1996:142) menyatakan bahwa pemberdayaan masyarakat adalah sebuah konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai sosial yakni bersifat *people-centered, participatory, empowering and sustainable*. Pengertian lain yang disampaikan oleh Tjokrowinoto (Kusnandi, 2006:219) konsep ini lebih luas dari hanya sekedar memenuhi kebutuhan dasar (*basic need*) akan tetapi juga menyediakan

mekanisme untuk mencegah proses pemiskinan lebih lanjut (*safety need*). Dengan kata lain pemberdayaan masyarakat bermaksud untuk mengembangkan kemampuan masyarakat agar secara mandiri memiliki ketrampilan untuk mengatasi masalah-masalah yang dihadapi.

Berbeda dengan pendapat Pranarka (Sulistiyani, 2004:78) menyampaikan: pemberdayaan sebenarnya merupakan istilah yang khas Indonesia daripada Barat. Di barat istilah tersebut diterjemahkan sebagai *empowerment*, dan istilah itu benar tapi tidak tepat. Pemberdayaan yang kita maksud adalah memberi “daya” bukan “kekuasaan” daripada “pemberdayaan” itu sendiri. Barangkali istilah yang paling tepat adalah “*energize*” atau katakan memberi “energi” pemberdayaan adalah pemberian energi agar yang bersangkutan mampu untuk bergerak secara mandiri. Menurut Rifa’i (2008:38) definisi pemberdayaan setiap individu memperoleh suatu pemahaman dan pengendalian kekuatan baik sosial, ekonomi, dan politik untuk memperbaiki keadaannya di suatu masyarakat.

Proses pemberdayaan masyarakat berarti kemampuan seseorang untuk memahami dan mengendalikan keadaan sosial, ekonomi dan kemampuan politiknya yang sangat diperlukan dalam upaya memperbaiki kedudukannya dimasyarakat, dengan kata lain proses pemberdayaan adalah setiap usaha pendidikan yang bertujuan untuk membangkitkan kesadaran/pengertian dan kepekaan pada warga masyarakat terhadap perkembangan sosial, ekonomi, dan/atau politik sehingga pada akhirnya warga masyarakat memiliki kemampuan untuk memperbaiki dan meningkatkan kedudukannya dalam masyarakat, atau menjadi masyarakat yang berdaya. Masyarakat yang berdaya adalah masyarakat

yang hidup dalam suatu masyarakat madani (*civil society*), yakni suatu masyarakat yang percaya atas kemampuan para anggotanya untuk menciptakan kehidupan yang lebih baik serta masyarakat yang menyadari akan hak-hak dan kewajibannya dalam hidup bermasyarakat dimana kondisi pemberdayaan akan terwujud apabila anggota masyarakat memperoleh kesempatan agar semakin berdaya (Tila'ar, 1997:231).

Pemberdayaan masyarakat adalah suatu proses bertahap yang dilakukan dalam rangka untuk meningkatkan kemampuan serta keterampilan masyarakat agar dapat memiliki keterampilan fungsional yang dapat digunakan sebagai daya saing dalam dunia pekerjaan dan dapat menjadikan masyarakat yang mandiri (Wibowo & Mulyono, 2014:54).

Menurut Noor (2011:88) menjelaskan pemberdayaan masyarakat dimaksudkan sebagai pemberdayaan yang sengaja dilakukan pemerintah untuk memfasilitasi masyarakat lokal dalam merencanakan, memutuskan dan mengelola potensi sumberdaya yang dimiliki sehingga mereka memiliki kemampuan dan kemandirian ekonomi, ekologi, sosial secara berkelanjutan.

Bannet, (2008:2) dalam jurnal internasional mengemukakan bahwa:

“Empowerment is the process that allows people to exert influence over decisions that affect their lives and well being. Community empowerment refers to a process whereby residents of disadvantaged geographic areas gain the means to influence policies, programs, and practices that their collective lives.”

Pemberdayaan adalah proses yang memungkinkan orang untuk memberikan pengaruh atas keputusan yang mempengaruhi kehidupan dan kesejahteraan mereka. Pemberdayaan masyarakat mengacu pada proses dimana penduduk dari wilayah geografis yang kurang beruntung mendapatkan sarana untuk

mempengaruhi kebijakan, program, serta praktik yang mempengaruhi kehidupan kolektif mereka.

Menurut Sumodiningrat, konsep pemberdayaan ekonomi secara ringkas adalah (Sumodiningrat, 2000:56) Pemberdayaan ekonomi rakyat merupakan usaha untuk menjadikan ekonomi yang kuat, besar, modern, dan berdaya saing tinggi dalam mekanisme pasar yang benar. Pemberdayaan ekonomi rakyat dilakukan dengan melalui perubahan struktural, yaitu dari ekonomi tradisional ke ekonomi modern, dari ekonomi lemah ke ekonomi kuat, dari ketergantungan menjadi ke kemandirian. Kebijakan yang perlu dilakukan dalam pemberdayaan ekonomi diantaranya adalah, pemberian peluang kepada aset produksi, penguatan industri kecil, mendorong munculnya wirausaha baru, dan memperkuat posisi transaksi kemitraan usaha ekonomi rakyat.

Menurut Ginanjar Kartasasmita (Mubyarto, 2010:263) pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daya masyarakat dengan mendorong, memotivasi, dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya. Keberdayaan masyarakat adalah unsur dasar yang memungkinkan suatu masyarakat bertahan, dan dalam pengertian yang dinamis mengembangkan diri dan mencapai kemajuan. Memberdayakan masyarakat berarti upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi tidak mampu melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Dengan kata lain memberdayakan adalah memandirikan masyarakat.

2.1.2 Lingkup Pemberdayaan Masyarakat

Menurut Sumadyo dalam (Mardikanto, 2017:113) merumuskan tiga upaya pokok dalam setiap pemberdayaan masyarakat, yang disebutnya Tri Bina, yaitu : Bina Manusia, Bina Usaha, dan Bina Lingkungan. Terhadap rumusan tersebut Mardikanto menambahkan pentingnya Bina Kelembagaan karena Tri Bina itu hanya akan terwujud seperti yang diharapkan, manakala didukung oleh efektivitas beragam kelembagaan yang diperlukan.

1) Bina Manusia

Bina manusia merupakan upaya yang pertama dan utama yang harus diperhatikan dalam setiap upaya pemberdayaan masyarakat. Termasuk dalam upaya Bina Manusia, adakah semua kegiatan yang termasuk dalam upaya penguatan/pengembangan kapasitas yaitu: a) pengembangan kapasitas individu; b) pengembangan kapasitas entitas/kelembagaan; c) pengembangan kapasitas sistem (jejaring)

2) Bina Usaha

Bina usaha menjadi suatu upaya penting dalam setiap pemberdayaan, sebab, bina manusia yang tanpa memberikan dampak atau manfaat bagi perbaikan kesejahteraan tidak akan laku , dan bahkan menambah kekecewaan. Tentang hal ini bina usaha mencakup: 1) Pemilihan komoditas atau jenis usaha; 2) Studi kelayakan dan perencanaan bisnis; 3) Pembentukan badan usaha; 4) Perencanaan investasi dan penetapan sumber pembiayaan; 5) Pengelolaan SDM dan pengembangan karir; 6) Manajemen produksi dan operasi; 7) Manajemen logistik dan finansial; 8) Penelitian dan pengembangan; 9) Pengembangan dan pengelolaan sistem informasi

bisnis; 10) Pengembangan jejaring dan kemitraan; 11) Pengembangan sarana dan prasarana pendukung

3) Bina Lingkungan

Selama ini pengertian lingkungan seringkali dimaknai sekadar lingkungan fisik utamanya yang menyangkut sumber daya alam dan lingkungan hidup. Tetapi dalam praktek perlu disadari bahwa lingkungan sosial juga sangat berpengaruh terhadap keberlanjutan bisnis dan kehidupan.

4) Bina Kelembagaan

Kata kelembagaan sering dikaitkan dengan dua pengertian, yaitu "*social institution*" atau pranata sosial dan "*social organization*" atau organisasi sosial. Apapun itu, pada prinsipnya suatu bentuk relasi sosial dapat disebut sebagai sebuah kelembagaan apabila memiliki empat komponen, yaitu adanya: 1) Komponen person, dimana orang-orang yang terlibat di dalam satu kelembagaan dapat diidentifikasi dengan jelas; 2) Komponen kepentingan, dimana orang-orang tersebut pasti sedang diikat oleh satu kepentingan atau tujuan, sehingga diantara mereka terpaksa harus saling berinteraksi; 3) Komponen aturan, dimana setiap kelembagaan mengembangkan seperangkat kesepakatan yang dipegang secara bersama, sehingga seseorang dapat menduga apa perilaku orang lain dalam lembaga tersebut. 4) Komponen struktur, dimana setiap orang memiliki posisi dan peran yang harus dijalankannya secara benar. Orang tidak bisa merubah-rubah posisinya dengan kemauan sendiri.

2.1.3 Prinsip-prinsip Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan dilakukan agar sasaran mampu meningkatkan kualitas hidupnya agar memiliki daya saing dan mampu hidup secara mandiri. Dalam pelaksanaannya pemberdayaan perlu memegang beberapa prinsip, yaitu (Anwas, 2014:58): 1) Pemberdayaan dilakukan dengan menghindari unsur paksaan, setiap individu memiliki hak yang sama untuk berdaya, dengan bakat dan potensi yang berbeda; 2) Kegiatan pemberdayaan didasarkan pada kebutuhan dan potensi sasaran, dimulai dengan menumbuhkan kesadaran akan potensinya yang dapat diberdayakan; 3) Sasaran pemberdayaan sebagai subjek dalam kegiatan, maka menjadi dasar pertimbangan dalam menentukan tujuan, pendekatan, dan bentuk aktivitas pemberdayaan; 4) Menumbuhkan kembali nilai luhur, budaya, dan kearifan lokal yang ada dalam masyarakat; 5) Pemberdayaan merupakan proses sehingga dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan; 6) Kegiatan pendampingan dilakukan secara bijaksana, bertahap, dan berkesinambungan; 7) Pemberdayaan tidak dapat dilakukan dari salah satu aspek saja, namun harus dilakukan secara holistik terhadap semua aspek kehidupan di masyarakat; 8) Pemberdayaan dilakukan untuk menggerakkan partisipasi masyarakat dan individu seluas-luasnya; 9) Sasaran pemberdayaan perlu ditumbuhkan jiwa kewirausahaan sebagai bekal menuju kemandirian; 10) Pemberdayaan perlu melibatkan berbagai unsur masyarakat mulai dari pemerintah, tokoh masyarakat, pengusaha, LSM, dan anggota masyarakat serta masih banyak pihak lainnya.

Karsidi dalam Sutikno (2010:136) menyatakan bahwa pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi sekarang tidak mampu untuk melepaskan diri dari

perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Dengan kata lain, pemberdayaan adalah memampukan dan memandirikan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat juga dapat diwujudkan dengan menerapkan prinsip-prinsip dasar pendampingan masyarakat, yaitu : 1) Belajar dari masyarakat, 2) Pendamping sebagai fasilitator, masyarakat sebagai pelaku; 3) Saling belajar, saling berbagi pengalaman

Pendapat lain disampaikan oleh Mardikanto (2017:105), menyatakan bahwa prinsip-prinsip pemberdayaan adalah mengerjakan artinya harus melibatkan masyarakat sebanyak mungkin untuk mengerjakan sesuatu, akibat artinya pemberdayaan harus memberikan akibat atau manfaat yang baik, asosiasi artinya setiap kegiatan pemberdayaan harus melibatkan masyarakat sebanyak mungkin untuk mengerjakan sesuatu, akibat artinya pemberdayaan harus memberikan akibat atau manfaat yang baik, asosiasi artinya setiap kegiatan pemberdayaan harus dikaitkan dengan kegiatan lainnya. Sedangkan menurut Daharma dan Bhatnagar dalam (Mardikanto, 2017:106) prinsip-prinsip pemberdayaan yaitu minat dan kebutuhan masyarakat, melibatkan organisasi masyarakat bawah (keluarga) pemberdayaan harus menyesuaikan keragaman budaya lokal, kegiatan pemberdayaan jangan sampai menimbulkan shock culture atau perubahan budaya yang mengejutkan masyarakat, kerjasama dan partisipasi, demokrasi dalam penerapan ilmu yaitu memberikan kesempatan kepada masyarakat dalam menawarkan penggunaan metode pemberdayaan ataupun dalam pengambilan keputusan.

2.1.4 Tujuan Pemberdayaan Masyarakat

Menurut Ahmad Suhaimi (2016:55) upaya pemberdayaan masyarakat untuk membuat masyarakat menjadi mandiri, dalam arti memiliki potensi untuk mampu memecahkan masalah-masalah yang mereka hadapi dan sanggup memenuhi kebutuhannya dengan tidak menggantungkan hidup mereka pada bantuan pihak-pihak luar, baik pemerintah maupun organisasi non pemerintah. Bantuan *technical assistance* jelas mereka perlukan, akan tetapi bantuan tersebut harus mampu membangkitkan prakarsa masyarakat untuk membangun bukan sebaliknya justru mematikan prakarsa. Dalam hubungan ini, kita dituntut menghargai hak-hak masyarakat yaitu *Right of Self -Determination* dan *Right For Equal Opportunity*. Hak untuk menentukan sendiri untuk memilih apa yang terbaik bagi masyarakat, serta hak untuk memperoleh kesempatan yang sama untuk berkembang sesuai dengan potensi-potensi yang mereka miliki.

Menurut Mardikanto (2017: 111), tujuan pemberdayaan yaitu beragam upaya perbaikan, seperti perbaikan pendidikan, dengan cara menumbuhkan semangat belajar seumur hidup agar pendidikan lebih baik, perbaikan aksesibilitas, ketika pendidikan telah baik, maka aksesibilitas masyarakat mengenai inovasi juga akan semakin baik, selanjutnya adalah perbaikan tindakan, dengan terjadi perbaikan pendidikan dan aksesibilitas maka tindakan masyarakat juga akan lebih baik, perbaikan kelembagaan, apabila telah terjadi perbaikan tindakan maka jejaring kemitraan usaha juga akan berkembang dengan baik, perbaikan usaha yaitu tercapai setelah terjadi perbaikan pendidikan, aksesibilitas, dan kelembagaan, selanjutnya perbaikan pendapatan yaitu dengan tercapainya perbaikan usaha maka akan memperbaiki keadaan pendapatan keluarga atau masyarakat, dengan pendapatan

yang baik maka selanjutnya akan ada perbaikan lingkungan baik fisik maupun sosial karena pendapatan masyarakat yang rendah menjadi penyebab kerusakan lingkungan, selanjutnya yaitu terjadi perbaikan kehidupan setelah tercapai perbaikan pendapatan dan lingkungan, dan yang terakhir adalah perbaikan masyarakat yaitu dengan melalui tercapainya perbaikan kehidupan dan lingkungan. Widiyanti (2012:88) mengemukakan program pemberdayaan memiliki tujuan yang sama yaitu sebagai usaha untuk menyelesaikan atau paling tidak mengurangi dampak masalah social.

Menurut Haris (2014:52) mengemukakan bahwa tujuan pemberdayaan pada dasarnya tujuan suatu pemberdayaan masyarakat pada dasarnya: Pertama, Dimaksudkan supaya individu, kelompok dan masyarakat memiliki kekuasaan atas kehidupannya. Kedua, Kegiatan pemberdayaan masyarakat diarahkan untuk meningkatkan harkat dan martabat manusia. Ketiga, Melalui kegiatan pada masyarakat dapat diciptakan perubahan kearah yang lebih baik dalam semua aspek kehidupan masyarakat sehingga dapat ditingkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat. Keempat, Guna mencapai tujuan kegiatan pemberdayaan masyarakat maka ada beberapa hal yang harus dilakukan diantaranya perlunya ditumbuhkan etos kerja yang kuat, bersikap hemat, efisien, efektif, akuntabel serta mengapresiasi prinsip keterbukaan. Perilaku dan budaya seperti ini memiliki peran yang penting untuk mendorong proses perubahan dalam masyarakat sehingga terbangun suatu komunitas maju dan mandiri dalam pencapaian tujuan pembangunan masyarakat.

(Soleh, 2014:81) menjelaskan tujuan akhir dari pemberdayaan masyarakat adalah: 1) Untuk meningkatkan harkat dan martabat manusia, serta untuk meningkatkan kualitas hidup. Perbaikan kualitas hidup bukan semata menyangkut aspek ekonomi, tetapi juga fisik, mental, politik, keamanan dan sosial budaya. 2) Untuk mencapai tujuan yang bersifat umum tersebut maka terdapat beberapa tujuan atau sasaran antara lain: a) Perbaikan kelembagaan, hal ini dimaksudkan agar terjalin kerjasama dan kemitraan antar pemangku kepentingan. Melalui perbaikan kelembagaan berbagai inovasi sosial yang dilakukan secara kemitraan antar pemangku kepentingan dapat meningkatkan produktivitas masyarakat. b) Perbaikan pendapatan, stabilitas ekonomi, keamanan dan politik yang mutlak diperlukan untuk terlaksananya pembangunan yang berkelanjutan. c) Perbaikan lingkungan hidup, dalam upaya memenuhi kebutuhan hidupnya masyarakat melakukan aktivitas ekonomi yang berakibat terjadinya kerusakan lingkungan hidup. Kerusakan lingkungan hidup bukan saja mengancam dirinya sendiri, tetapi juga generasi yang akan datang. d) Perbaikan akses, baik berkenaan dengan inovasi teknologi, permodalan/kredit, sarana prasarana produksi, peralatan dan mesin serta energi listrik yang diperlukan dalam proses produksi. Demikian pula pentingnya perbaikan akses pasar dan jaminan harga serta pengambilan keputusan politik. e) Perbaikan tindakan, melalui pendidikan kualitas SDM dapat ditingkatkan sehingga diharapkan berdampak pada perbaikan sikap dan tindakan yang lebih bermanfaat. f) Perbaikan usaha produktif, melalui upaya pendidikan dan latihan dan perbaikan kelembagaan serta akses permodalan, diharapkan usaha-usaha yang bersifat

produktif lebih maju dan berdaya saing. g) Perbaikan-perbaikan bidang lainnya sesuai dengan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat.

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan tujuan dari pemberdayaan masyarakat adalah memperbaiki keadaan suatu masyarakat agar memiliki kekuatan dalam berbagai aspek sehingga terciptanya kemandirian dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dan tidak bergantung pada orang lain. Dengan adanya strategi pemberdayaan masyarakat maka cara atau langkah yang dilakukan dalam kegiatan pemberdayaan menjadi lebih efektif dan efisien sesuai dengan kondisi masyarakat.

2.1.5 Strategi Pemberdayaan Masyarakat

Strategi merupakan suatu proses sekaligus produk yang “penting” yang berkaitan dengan pelaksanaan dan pengendalian kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk memenangkan persaingan, demi tercapainya tujuan (Mardikanto, 2017:168) Strategi pemberdayaan masyarakat, pada dasarnya mempunyai tiga arah, yaitu : Pertama, Pemihakan dan pemberdayaan masyarakat. Kedua, Pemantapan otonomi dan pendelegasian wewenang dalam pengelolaan pembangunan yang mengembangkan peran serta masyarakat. Ketiga, Modernisasi melalui penajaman arah perubahan struktur sosial ekonomi (termasuk didalamnya kesehatan), budaya dan politik yang bersumber pada partisipasi masyarakat. Dengan demikian pemberdayaan masyarakat dapat dilaksanakan dengan strategi sebagai berikut: 1) Menyusun instrumen pengumpulan data. Dalam kegiatan ini informasi yang diperlukan dapat berupa hasil penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, referensi yang ada dari hasil temuan dari pengamatan lapang; 2)

Membangun pemahaman, komitmen untuk mendorong kemandirian individu, keluarga dan masyarakat. 3) Mempersiapkan sistem informasi, mengembangkan sistem analisis, intervensi, monitoring dan evaluasi pemberdayaan individu, keluarga dan masyarakat.

Menurut Suharto dalam (Mardikanto, 2017:170) strategi pemberdayaan masyarakat dengan adanya 5 (lima) aspek penting yang dapat dilakukan dalam melakukan pemberdayaan masyarakat, khususnya melalui pelatihan dan advokasi terhadap masyarakat miskin, yaitu:

1. Motivasi yaitu dalam hubungan ini setiap keluarga harus dapat memahami nilai kebersamaan, interaksi sosial dan kekuasaan melalui pemahaman akan hak nya sebagai warga negara dan anggota masyarakat. Karena itu, setiap rumah tangga perlu didorong untuk membentuk kelompok yang merupakan mekanisme kelembagaan penting untuk mengorganisir dan melaksanakan kegiatan pengembangan masyarakat di desa atau kelurahannya. Kelompok ini kemudian dimotivasi untuk terlibat dalam kegiatan peningkatan pendapatan dengan menggunakan sumber-sumber dan kemampuan-kemampuan mereka sendiri.
2. Peningkatan kesadaran dan pelatihan kemampuan dapat dicapai melalui pendidikan dasar, perbaikan kesehatan, dan sanitasi. Sedangkan keterampilan vokasional dapat dikembangkan melalui cara-cara partisipatif. Pelatihan semacam ini dapat membantu masyarakat miskin untuk menciptakan mata pencaharian sendiri ata membantu meningkatkan keahlian mereka untuk mencari pekerjaan.

3. Manajemen diri yaitu setiap kelompok masyarakat harus mampu memilih pemimpin mereka sendiri dan mengatur kegiatan mereka sendiri, seperti melaksanakan pertemuan, melakukan pencatatan dan pelaporan, dan manajemen kepemilikan masyarakat. Pada tahap awal pendampingan dari luar dapat membantu mereka dalam mengembangkan sebuah sistem. Kelompok kemudian dapat diberi wewenang penuh untuk melaksanakan dan mengatur sistem tersebut.
4. Mobilisasi sumberdaya yaitu untuk memobilisasi sumberdaya masyarakat diperlukan pengembangan metode untuk menghimpun sumber-sumber individual melalui tabungan reguler dan sumbangan sukarela dengan tujuan menciptakan modal sosial. Pengembangan sistem penghimpunan, pengalokasian, dan penggunaan sumber perlu dilakukan secara cermat sehingga semua anggota memiliki kesempatan yang sama.
5. Pembangunan dan pengembangan jejaring yaitu pengorganisasian kelompok-kelompok swadaya masyarakat perlu disertai dengan peningkatan kemampuan para anggotanya membangun dan mempertahankan jaringan dengan berbagai sistem sosial di sekitarnya. Jaringan ini sangat penting dalam menyediakan dan mengembangkan berbagai akses terhadap sumber dan kesempatan bagi peningkatan keberdayaan masyarakat miskin.

Sedangkan menurut Ismawan (Priyono & Pranarka, 1996:170) menetapkan 5 (lima) program strategi pemberdayaan yaitu:

1. Pengembangan sumberdaya manusia, yang meliputi berbagai macam pendidikan dan latihan baik untuk anggota maupun pengurus kelompok,

mencakup pendidikan dan latihan keterampilan pengelolaan kelembagaan kelompok, teknis produksi dan usaha.

2. Pengembangan kelembagaan kelompok, yang antara lain meliputi bantuan menyusun mekanisme organisasi, kepengurusan, administrasi, dan peraturan rumah tangga.
3. Pemupukan modal masyarakat, menghubungkan kelompok dengan lembaga-lembaga keuangan setempat untuk mendapatkan manfaat bagi pemupukan modal lebih lanjut.
4. Pengembangan usaha produktif, antara lain peningkatan usaha produktif (dan jasa), pemasaran yang disertai dengan kegiatan studi kelayakan usaha dan informasi pasar
5. Penyediaan informasi tepat guna, yaitu berupa exposure program, penerbitan buku, dan majalah yang dapat memberikan masukan yang mendorong inspirasi ke arah inovasi usaha lebih lanjut.

Dalam kaitannya dengan pemberdayaan masyarakat, kelima aspek pemberdayaan dapat dilakukan melalui 5 P strategi pemberdayaan yang dapat yaitu pemungkinan, penguatan, perlindungan, penyokongan, dan pemeliharaan (Suharto, 2009:34):

1. Pemungkinan : yaitu menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat miskin berkembang secara optimal. Pemberdayaan harus mampu membebaskan masyarakat miskin dari sekat-sekat kultural dan struktural yang menghambat;

2. Penguatan : melalui memperkuat pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki masyarakat miskin dalam memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Pemberdayaan harus mampu menumbuh kembangkan segenap kemampuan dan kepercayaan diri masyarakat miskin yang menunjang kemandirian mereka;
3. Perlindungan ; yaitu melindungi masyarakat terutama kelompok-kelompok lemah agar tidak tertindas oleh kelompok kuat, menghindari terjadinya persaingan yang tidak seimbang (apalagi tidak sehat) antara yang kuat dan yang lemah, dan mencegah terjadinya eksploitasi kelompok kuat terhadap kelompok lemah. Pemberdayaan harus diarahkan pada penghapusan segala jenis diskriminasi dan dominasi yang tidak menguntungkan rakyat kecil.
4. Penyokongan : atau memberikan bimbingan dan dukungan agar masyarakat miskin mampu menjalankan peranan dan tugas-tugas kehidupannya. Pemberdayaan harus mampu menyokong masyarakat miskin agar tidak terjatuh ke dalam keadaan dan posisi semakin lemah dan terpinggirkan;
5. Pemeliharaan : dalam arti memelihara kondisi yang kondusif agar tetap terjadi keseimbangan distribusi kekuasaan antara berbagai kelompok dalam masyarakat. Pemberdayaan harus mampu menjamin keselarasan dan keseimbangan yang memungkinkan setiap orang memperoleh kesempatan berusaha.

Menurut Mulyono dalam (Mulyono, 2017:86) menjelaskan strategi sering diartikan sebagai langkah-langkah tindakan tertentu yang dilaksanakan demi tercapainya suatu tujuan atau penerima manfaat yang dikehendaki. Adapun

langkah-langkah strategi pemberdayaan masyarakat miskin agar tercapai tujuan yang diharapkan antara lain adalah : (1) memetakan karakteristik orang miskin; (2) mencari sasaran pemberdayaan yang disesuaikan dengan kelompok target potensial; (3) melakukan pemberdayaan masyarakat melalui pendidikan dan pelatihan; sesuai dengan kebutuhan pasar baik dunia industri maupun dunia usaha; (4) mempertemukan antara kelompok target potensial dengan kebutuhan pasar; (5) masyarakat menjadi berdaya; (6) peningkatan ekonomi masyarakat dan atau memiliki mata pencaharian.

Hanna & Robinson dalam Bancin (2011:182) menyatakan pada dasarnya ada tiga strategi utama dalam pemberdayaan masyarakat terkait praktik perubahan sosial yaitu tradisional, *direct action* (aksi langsung), dan transformasi. Strategi tradisional menyarankan agar mengetahui dan memilih kepentingan secara bebas dalam berbagai keadaan. Strategi *direct-action* membutuhkan dominasi kepentingan yang dihormati oleh semua pihak yang terlibat, dipandang dari sudut perubahan yang mungkin terjadi. Strategi transformasi menunjukkan bahwa pendidikan masyarakat dalam jangka panjang dibutuhkan sebelum pengidentifikasian kepentingan itu sendiri.

Menurut Desmawati (2015:85) menjelaskan bahwa strategi pemberdayaan masyarakat menurut FGD, wawancara mendalam dengan *keyperson*, berdasarkan hasil penelitian didapatkan tiga strategi pemberdayaan masyarakat. adapun ketiga strategi pemberdayaan masyarakat tersebut adalah sebagai berikut:

1. Supply lebih kecil dari demand

Strategi supply lebih kecil dari demand ini adalah memberikan pemberdayaan masyarakat melalui pelatihan kepada masyarakat miskin dan menganggur untuk diberi ketrampilan yang dimulai dari dasar (ketrampilan dasar) karena masyarakat (warga belajar) benar-benar belum memiliki ketrampilan sesuai kebutuhan pasar.

2. Supply sama dengan demand

Strategi supply sama dengan demand ini adalah pelatihan diberikan kepada warga belajar terutama untuk menumbuhkembangkan skill kewirausahaan karena warga belajar telah memiliki ketrampilan sesuai dengan kebutuhan pasar.

3. Supply tidak sama dengan atau lebih tinggi demand

Pelatihan ini diberikan kepada warga belajar terutama untuk memfasilitasi peningkatan usaha atau memfasilitasi pencarian alternatif pengembangan karena warga belajar telah memiliki ketrampilan tidak sama atau lebih tinggi dengan kebutuhan pasar.

2.1.6 Pendekatan Pemberdayaan

Menurut Suharto dalam (Mulyono, 2017:46) menjelaskan akibat dari pemahaman hakikat pemberdayaan yang berbeda-beda, lahirlah dua sudut pandang yang bersifat kontradiktif. Kedua sudut pandang tersebut memberikan implikasi atas pendekatan yang berbeda pula di dalam melakukan langkah pemberdayaan masyarakat. Pendekatan yang pertama memahami pemberdayaan sebagai sudut pandang konfliktual. Munculnya cara pandang tersebut didasarkan perspektif konflik antara pihak yang memiliki daya/ kekuatan disatu sisi dan yang berhadapan dengan pihak yang lemah sisi lainnya. Pendapat ini diwarni oleh pemahaman bahwa kedua pihak yang berhadapan tersebut sebagai suatu fenomena kompetisi untuk

mendapatkan daya yaitu pihak yang kuat berhadapan kelompok lemah berakibat pada berkurangnya daya pada kelompok lain. Sudut pandang ini lebih populer dengan istilah *zero-sum*.

Menurut Reid dalam (Ani, 2017:506) dalam Jurnal Internasional mengemukakan bahwa pendekatan pemberdayaan dapat diketahui sebagai berikut:

'suggested few steps and processes for implementing empowerment approach in community development in which must be done in sequence. The steps are as follows: a) Building Hope, b) Widespread Participation, c) Building Relationship with Partners, d) Creating Visions, e) Establishing Work Plan, f) Finding Resources, g) Creating Success, h) Developing Community Capacity, i). Adapting Strategy Plan, and j) Development Towards Sustainability.

Artinya: Ada beberapa langkah dan proses untuk menerapkan pendekatan pemberdayaan dalam pengembangan masyarakat yang harus dilakukan secara berurutan. Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut: a) Membangun harapan, b) partisipasi Luas, c) membangun hubungan dengan mitra, d) menciptakan visi, e) menetapkan rencana kerja, f) mencari sumberdaya, g) menciptakan sukses, h) mengembangkan kapasitas masyarakat, i) rencana strategi, dan j) pengembangan menuju keberlanjutan.

Menurut Achmad Rifa'i (2008:45) menjelaskan adanya empat usaha yang mencerminkan pendekatan pemberdayaan. Keempatnya memeberikan sumber informasi yang beragam dan ekstensif mengenai karakteristik proses pemberdayaan yaitu : (a) organisasi masyarakat, (b) kolaborasi dan swa-kelola karyawan, (c) pendekatan partisipatori di dalam pendidikan orang dewasa, penelitian, dan pembangunan pedesaan, dan (d) pendidikan yang secara spesifik untuk mengatasi ketidakadilan dan penindasan.

Elliot dalam (Mardikanto, 2017:159) menjelaskan ada tiga macam pendekatan dalam pemberdayaan yaitu pendekatan kesejahteraan, pendekatan pembangunan, dan pendekatan pemberdayaan sebagai berikut:

1. Pendekatan kesejahteraan (*welfare approach*), yang lebih memusatkan pada pemberian bantuan kepada masyarakat untuk menghadapi bencana alam, dan lain-lain tanpa bermaksud untuk memberdayakan masyarakat keluar dari pemiskinan rakyat dan ketidakberdayaan mereka mereka dalam proses kegiatan politik.
2. Pendekatan pembangunan (*development approach*), yang memusatkan perhatiannya kepada upaya-upaya peningkatan kemampuan, pemandirian, dan keswadayaan.
3. Pendekatan pemberdayaan (*empowerment approach*), yang memfokuskan pada penanggulangan kemiskinan (yang merupakan penyebab ketidakberdayaan) sebagai akibat proses politik. Pendekatan ini dilakukan melalui program-program pelatihan pemberdayaan untuk segera terlepas dari ketidakberdayaan mereka.

2.1.7 Tahap – Tahap Pemberdayaan Masyarakat

Menurut Sulistiyani (2004: 83) tahap-tahap pemberdayaan yang harus dilalui meliputi :1) Tahap kesadaran dan pembentukan prilaku menuju prilaku sadar dan peduli sehingga merasa membutuhkan peningkatan kapasitas diri. 2) Tahap transformasi kemampuan berupa wawasan pengetahuan, kecakapan ketrampilan agar terbuka wawasan dan memberikan ketrampilan dasar sehingga dapat mengambil peran di dalam pembangunan. 3) Tahap peningkatan kemampuan

intelektual, kecakapan-ketrampilan sehingga terbentuklah inisiatif dan kemampuan inovatif untuk menghantarkan pada kemandirian.

Tahap pertama atau tahap penyadaran dan pembentukan perilaku merupakan tahap persiapan dalam proses pemberdayaan masyarakat. Pada tahap ini pihak pemberdaya/aktor/pelaku pemberdayaan berusaha menciptakan prakondisi, supaya dapat memfasilitasi berlangsungnya proses pemberdayaan yang efektif. Apa yang diinvertensi dalam masyarakat sesungguhnya lebih pada kemampuan afektifnya untuk mencapai kesadaran konatif yang diharapkan. Sentuhan penyadaran akan lebih membuka keinginan dan kesadaran masyarakat tentang kondisinya saat itu, dengan demikian dapat merangsang kesadaran mereka tentang perlunya memperbaiki kondisi untuk menciptakan masa depan yang lebih baik. sentuhan rasa ini akan membawa kesadaran masyarakat tumbuh, kemudian semangat kebangkitan mereka untuk meningkatkan kemampuan diri dan lingkungan. Dengan adanya semangat tersebut diharapkan dapat mengantarkan masyarakat untuk sampai pada kesadaran dan kemauan belajar. dengan demikian masyarakat semakin terbuka dan merasa membutuhkan pengetahuan dan keterampilan untuk memperbaiki kondisi.

Pada tahap kedua, yaitu proses transformasi pengetahuan dan kecakapan keterampilan dapat berlangsung baik, penuh semangat dan berjalan efektif, jika tahap pertama telah terkondisi. Masyarakat akan menjalani proses belajar tentang pengetahuan dan kecakapan keterampilan yang memiliki relevansi dengan apa yang menjadi tuntutan kebutuhan tersebut. keadaan ini akan menstimulasi terjadinya keterbukaan wawasan dan menguasai kecakapan-keterampilan dasar yang mereka

butuhkan. Pada tahap ini masyarakat hanya dapat memberikan peran partisipasi pada tingkat yang rendah, yaitu sekedar menjadi pengikut atau obyek pembangunan saja, belum mampu menjadi subyek dalam pembangunan.

Tahap ketiga, merupakan tahap pengayaan atau peningkatan intelektualitas dan kecakapan-keterampilan yang diperlukan, supaya mereka dapat membentuk kemampuan kemandirian. Kemandirian tersebut ditandai oleh kemampuan masyarakat di dalam membentuk inisiatif, melahirkan kreasi-keasi, dan melakukan inovasi-inovasi di dalam lingkungannya. Apabila masyarakat telah mencapai tahap ketiga ini maka masyarakat secara mandiri melakukan pembangunan. Dalam konsep pembangunan masyarakat seringkali didudukkan sebagai subyek pembangunan atau pemeran utama, pemerintah hanya fasilitator.

Joko Sutarto (2008:180) menjelaskan secara garis besar ada dua hal pokok penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat yaitu: tahap persiapan operasional dan tahap pelaksanaan kegiatan. Tahap operasional meliputi: 1. pemberitahuan kepada kelompok sasaran/warga belajar tentang penyelenggaraan kegiatan, 2. menetapkan tempat penyelenggaraan kegiatan dan berbagai fasilitas penunjang kegiatan, 3 mempersiapkan kelengkapan materi/ bahan ajar yang menunjang proses pemberdayaan. Sedangkan tahap pelaksanaan kegiatan berkaitan dengan rumusan tujuan pemberdayaan, dan pengalokasian waktu penyelenggaraan kegiatan secara menyeluruh.

Menurut Sumodiningrat dalam (Mulyono, 2017:44) disampaikan bahwa proses belajar dalam rangka pemberdayaan masyarakat berlangsung secara bertahap. Tahap-tahap yang harus dilalui tersebut meliputi:

- 1) Tahap penyadaran dan pembentukan perilaku menuju perilaku sadar dan peduli sehingga merasamembutuhkan peningkatan kapasitas diri;
- 2) Tahap transformasi kemampuan berupa wawasan pengetahuan, kecakapan-kecakapan keterampilan agar terbuka wawasan dan memberikan keterampilan dasar sehingga dapat mengambil peran di dalam pembangunan;
- 3) Tahap peningkatan kemampuan intelektual dan kemampuan inovatif untuk mengantarkan pada kemandirian.

Menurut Wilson dalam (Tukasno, 2013:183) ada tujuh tahapan siklus pemberdayaan masyarakat. Tahap pertama, keinginan dari masyarakat untuk berubah menjadi lebih baik. Tahap kedua, masyarakat diharapkan mampu melepaskan halangan atau faktor-faktor yang bersifat resistensi terhadap kemajuan. Tahap ketiga, masyarakat diharapkan menerima kebebasan tambahan dan merasa memiliki tanggungjawab untuk mengembangkan diri. Tahap keempat, upaya untuk mengembangkan peran dan tanggungjawab yang lebih luas. Tahap kelima, hasil-hasil nyata dari pemberdayaan mulai kelihatan, peningkatan rasa memiliki yang lebih besar menghasilkan keluaran kinerja yang lebih baik. Tahap keenam, terjadi perubahan perilaku dan kesan terhadap dirinya, keberhasilan dalam peningkatan kinerja mampu meningkatkan perasaan psikologis di atas posisi sebelumnya. Tahap ketujuh, masyarakat berhasil memberdayakan diri dan tertantang untuk upaya yang lebih besar guna mendapatkan hasil yang lebih baik

Menurut Lippit (Mardikanto, 2017: 123) tahapan kegiatan pemberdayaan masyarakat dibagi ke dalam 7 kegiatan pokok yaitu penyadaran terhadap

keberadaan masyarakat, menunjukkan adanya masalah, membantu pemecahan masalah, menunjukkan pentingnya perubahan yang terjadi di masyarakat, melakukan pengujian dan demonstrasi sebagai implementasi perubahan yang terencana, memproduksi dan publikasi informasi, melaksanakan pemberdayaan.

Studi internasional dalam penelitian proses pemberdayaan yang dikemukakan oleh Keiffer dalam Lord (1993:3) sebagai berikut:

“work on personal empowerment is one of the only major empirical studies which examines personal empowerment as a process. He labels empowerment as a developmental process which includes four stages: entry, advancement, incorporation, and commitment. The entry stage appears to be motivated by the participant's experience of some event or condition threatening to the self or family, what Keiffer refers to as an act of 'provocation'. In the advancement stage, there are three major aspects which are important to continuing the empowerment process: a mentoring relationship; supportive peer relationships with a collective organization; and the development of a more critical understanding of social and political relations. The central focus of the third stage appears to be the development of a growing political consciousness. Commitment is the final stage - one in which the participants apply the new participatory competence to ever expanding areas of their lives”

Pemberdayaan adalah satu-satunya yang utama studi empiris meneliti pemberdayaan sebagai suatu proses. Peneliti memberi label pemberdayaan sebagai proses meliputi empat tahap: masukan, kemajuan, penggabungan, dan komitmen. Tahap masukan dimotivasi oleh pengalaman peserta dari beberapa peristiwa atau kondisi yang mengancam diri atau keluarga, apa yang Keiffer sebut sebagai tindakan 'provokasi'. Di tahap kemajuan, ada tiga aspek utama yang penting untuk melanjutkan proses pemberdayaan: pendampingan hubungan, hubungan rekan yang mendukung dengan organisasi kolektif, dan pengembangan pemahaman yang lebih kritis tentang hubungan sosial dan politik. Tahap ketiga penggabungan adalah

pengembangan kesadaran politik yang berkembang. Komitmen adalah tahap terakhir dimana peserta menerapkan kompetensi partisipatif baru untuk memperluas bidang kompetensi mereka.

Menurut Rifa'i (2008: 40) menjelaskan pemberdayaan terjadi melalui beberapa tahap. *Pertama*, setiap orang mengembangkan kesadaran awal sehingga mereka dapat mengambil tindakan untuk memperbaiki kehidupannya dan memperoleh pelbagai keterampilan yang memungkinkan mereka melaksanakannya. *Kedua*, melalui pengambilan tindakan, mereka mengalami keberdayaan serta kepercayaan dirinya meningkat. *Ketiga*, karena adanya pertumbuhan keterampilan dan kepercayaan, setiap orang bekerja sama berusaha mempengaruhi keputusan dan sumber daya yang mengakibatkan kesejahteraan.

2.1.8 Metode Pemberdayaan Masyarakat

Menurut Kang dan Song dalam (Mardikanto, 2017:197) menjelaskan tentang tidak adanya satupun metode yang selalu efektif untuk diterapkan dalam setiap kegiatan pemberdayaan masyarakat. Dalam banyak kasus kegiatan pemberdayaan masyarakat harus dilaksanakan dengan menerapkan beragam metode sekaligus saling melengkapi. Sedangkan menurut Mardikanto (2017:198) ada enam ragam metode pemberdayaan masyarakat “partisipatif” berupa :

1. RRA (*Rapid Rural Appraisal*) merupakan metode penilaian keadaan desa secara cepat, yang dalam praktik, kegiatan RRA lebih banyak dilakukan oleh “orang luar” dengan tanpa atau sedikit melibatkan masyarakat setempat.
2. PRA (*Participatory Rapid Appraisal*) atau Penilaian Desa secara Partisipatif merupakan penyempurnaan dari RRA yang dilakukan oleh (sekelompok) tim

yang terdiri dari “orang luar” , PRA dilakukan dengan lebih banyak melibatkan “orang dalam” yang terdiri dari semua stakeholder (pemangku kepentingan kegiatan) dengan difasilitasi oleh orang luar yang lebih berfungsi sebagai “narasumber” atau fasilitator dibanding sebagai instruktur atau guru yang “menggurui”.

3. FGD (*Focus Group Discussion*) atau Diskusi Kelompok Terarah sebagai suatu metode pengumpulan data, FGD merupakan interaksi individu yang seolah pemandu (moderator) diarahkan untuk mendiskusikan pemahaman dan atau pengalamannya tentang sesuatu program atau kegiatan yang diikuti dan atau dicermatinya.
4. PLA (*Participatory Learning And Action*) atau Proses Belajar dan Praktik secara Partisipatif merupakan bentuk baru dari metode pemberdayaan masyarakat yang dahulu dikenal sebagai “Learning by doing”
5. SL atau Sekolah Lapang (*Farmers Field School/FFC*) merupakan kegiatan pertemuan berkala yang dilakukan oleh sekelompok masyarakat pada hamparan tertentu, yang diawali dengan membahas masalah yang sedang dihadapi, kemudian diikuti dengan curah pendapat, berbagai pengalaman sharing tentang alternative dan pemilihan cara-cara pemecahan masalah yang paling efektif dan efisien sesuai dengan sumberdaya yang dimiliki.
6. Pelatihan Partisipatif dirancang sebagai implementasi metode pendidikan orang dewasa dengan ciri utama, pertama, hubungan instruktur/fasilitator dengan peserta didik tidak lagi bersifat vertikal tetapi bersifat lateral/horizontal; kedua, lebih mengutamakan proses daripada hasil, dalam arti, keberhasilan pelatihan

tidak diukur dari seberapa banyak terjadi alih pengetahuan, tetapi seberapa jauh terjadi interaksi atau diskusi dan berbagai pengalaman antara sesama peserta maupun antara fasilitator dan pesertanya.

2.1.9 Indikator Keberhasilan Pemberdayaan

Menurut Ahmad Suhaimi (2016:61) indikator keberhasilan masyarakat adalah kemandirian dan keberlanjutan. Pilar-pilar kemandirian dan keberlanjutan meliputi: (1) kemandirian dan keberlanjutan organisasi-organisasi komunitas yang telah terbangun; (2) Kemandirian dan keberlanjutan dana dan program oleh masyarakat; (3) kemandirian dan keberlanjutan dana dan program oleh masyarakat; (4) kemandirian dan keberlanjutan visi dan misi, program, prinsip, dan nilai-nilai yang dianut dalam pelaksanaan; (5) program *community development*. Sedangkan ciri-ciri masyarakat yang mandiri antara lain : (1) mampu mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi, merumuskan serta menetapkan prioritasnya; (2) mampu merumuskan alternatif untuk menyelesaikan permasalahan; (3) mampu mengorganisir diri, sebagai salah satu cara penanggulangan bersama; (4) mampu mengembangkan aturan main, nilai, norma, yang disusun, disepakati serta dipatuhi bersama; (5) mampu memperluas kerjasama kemitraan yang setara (termasuk dalam kewirausahaan)

Menurut Girvan (Mardikanto, 2017:289) mengembangkan beberapa indikator pemberdayaan yang disebut indeks pemberdayaan yang disebut indeks pemberdayaan, yang meliputi kebebasan mobilitas, kemampuan membeli komoditas kecil, kemampuan membeli komoditas besar, terlibat dalam pembuatan keputusan-keputusan rumah tangga, kebebasan relatif dari dominasi keluarga,

kesadaran hukum dan politik, keterlibatan dalam kampanye dan protes-protes, jaminan ekonomi dan kontribusi terhadap keluarga.

Menurut Mardikanto (2017: 291), terdapat enam indikator keberhasilan untuk mengukur pelaksanaan pemberdayaan masyarakat: 1) Jumlah warga yang tertarik untuk hadir dalam tiap kegiatan. 2) Frekuensi kehadiran tiap warga. 3) Tingkat kemudahan penyelenggaraan program untuk memperoleh pertimbangan warga atas ide baru yang dikemukakan. 4) Jumlah dana yang dapat digali dari masyarakat untuk menunjang pelaksanaan program kegiatan. 5) Berkurangnya masyarakat yang menderita sakit malaria. 6) Meningkatnya kemandirian kesehatan masyarakat

Sedangkan menurut Sumodiningrat (1999:138) indikator keberhasilan pemberdayaan masyarakat adalah: 1) Berkurangnya jumlah penduduk miskin. 2) Berkembangnya usaha peningkatan pendapatan yang dilakukan penduduk dengan memanfaatkan sumberdaya yang ada. 3) Meningkatnya kepedulian masyarakat terhadap upaya peningkatan kesejahteraan keluarga miskin di lingkungannya. 4) Meningkatnya kemandirian kelompok yang ditandai dengan makin berkembangnya usaha produktif, makin kuatnya permodalan kelompok, serta makin rapinya sistem administrasi kelompok. 5) Meningkatnya kapasitas masyarakat dan pemerataan pendapatan yang ditandai oleh peningkatan pendapatan, sehingga mampu memenuhi kebutuhan pokok dan sosial dasarnya.

Menurut Widiasih dan Suminar (2015:90) indikator keberhasilan sebuah program dapat dilihat dari kesesuaian proses dengan apa yang direncanakan, kesesuaian dalam pencapaian tujuan, penggunaan dan pemanfaatan sumber daya

yang efektif dan efisien, serta kemampuan dalam memberikan jaminan terhadap kesesuaian proses dan pencapaian tujuan melalui suatu mekanisme kendali yang harmonis dan melekat untuk proses. faktor internal yang menghambat pemberdayaan antara lain, kurang bisa untuk saling mempercayai, kurang daya inovasi/kreativitas, mudah pasrah/ menyerah/putus asa, aspirasi dan cita-cita rendah, tidak mampu menunda menikmati hasil kerja, wawasan waktu yang sempit, familisme, sangat tergantung pada bantuan pemerintah, sangat terikat pada tempat kediamannya dan tidak mampu/tidak bersedia menempatkan diri sebagai orang lain. (Malik & Mulyono, 2017:88).

Dalam jurnal internasional (Vitasurya, 2016:105) menyatakan

Development of rural tourism based on the preservation of the environment can not be separated from the element of empowerment. Successful development can be measured through three main aspects (Nugroho, 2011) ie economic aspects to measure its added value in the economy of the community, social aspects to measure the community as stakeholders in managing tourism village, and environmental aspects to measure impacts of tourism in the perspective of environmental conservation.

Yang artinya pengembangan desa wisata berbasis pada pelestarian lingkungan tidak dapat dipisahkan dari unsur pemberdayaan. Keberhasilan pengembangan dapat diukur melalui tiga aspek utama (Nugroho, 2011) yaitu aspek ekonomi untuk mengukur nilai tambah dalam perekonomian masyarakat, aspek sosial untuk mengukur masyarakat sebagai pemangku kepentingan dalam mengelola desa wisata, dan aspek lingkungan untuk mengukur dampak pariwisata dalam perspektif pelestarian lingkungan.

2.2 Potensi Lokal

2.2.1 Pengertian Potensi Lokal

Potensi lokal adalah kekayaan alam, budaya, dan SDM pada suatu daerah. Potensi alam di suatu daerah bergantung pada kondisi geografis, iklim, dan bentang alam daerah tersebut. Kondisi alam yang berbeda tersebut menyebabkan perbedaan dan ciri khas potensi lokal setiap wilayah. Kekhasan bentang alam, perilaku dan budaya masyarakat setempat, dan kesejahteraan masyarakat membentuk segitiga interaksi yang saling berkaitan. Oleh karenanya, pembangunan dan pengembangan potensi lokal suatu daerah harus memperhatikan ketiga unsur tersebut (Pingkan Aditiawati, Dea Indriani Astuti, Gede Suantika, 2016). Sedangkan menurut Soleh (2017) Potensi adalah daya, kekuatan, kesanggupan dan kemampuan yang mempunyai kemungkinan untuk dapat dikembangkan. Jadi Potensi desa adalah daya, kekuatan, kesanggupan dan kemampuan yang dimiliki oleh suatu desa yang mempunyai kemungkinan untuk dapat dikembangkan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Potensi lokal adalah kemampuan/kekuatan/daya yang dimiliki oleh suatu daerah atau tempat yang dapat dikembangkan untuk menghasilkan manfaat/keuntungan bagi suatu daerah (Martadani Noor, 2018).

Menurut Victorino (2004) potensi lokal mempunyai makna sebagai sumber/kekuatan yang dimiliki oleh masing-masing daerah untuk dapat dimanfaatkan dalam kegiatan-kegiatan tertentu. Potensi lokal tidak terlepas dari konsep masukan lingkungan sebagai pendukung untuk berlangsungnya proses pembelajaran. Dengan memanfaatkan potensi yang ada dimasyarakat, diharapkan masyarakat tidak merasa asing, sehingga motivasi untuk mengembangkan berbagai program pembelajaran terus meningkat. Potensi lokal pada intinya merupakan sumber daya yang ada dalam suatu wilayah tertentu. Potensi lokal berkembang dari

tradisi kearifan yang dimiliki oleh suatu masyarakat yang bersahaja sebagai bagian dari kebudayaannya. Mengacu kepada pendapat Victorino, ciri umum dari potensi lokal adalah: a) ada pada lingkungan suatu masyarakat, b) masyarakat merasa memiliki, c) bersatu dengan alam, d) memiliki sifat universal, e) bersifat praktis, f) mudah dipahami dengan menggunakan comon sense, g) merupakan warisan turun temurun.

Menurut Martadani Noor (2018:2) desa memiliki potensi yang bisa diangkat menjadi komoditas dan dipoles dengan manajemen strategi yang tepat untuk menjadi desa wisata. Catur (2015) menyebutkan langkah-langkah strategis untuk mengembangkan potensi desa menjadi desa wisata sebagai berikut : 1) Identifikasi dan permasalahan Potensi Desa. 2) Identifikasi Dampak Kegiatan Pariwisata. 3) Komitmen Menggandeng Pemerintah Daerah. 4) Perangkat Regulasi/Norma. 5) Pelatihan Manajemen Pariwisata. 6) Media sebagai sarana informasi dan publikasi. 7) Studi Banding ke Desa Wisata Yang Berhasil.

2.2.2 Jenis-Jenis Potensi Desa

Menurut Soleh (2017) potensi desa dapat dibedakan menjadi dua; Pertama adalah potensi fisik yang berupa tanah, air, iklim, lingkungan geografis, binatang ternak, dan sumber daya manusia. Kedua adalah potensi non-fisik berupa masyarakat dengan corak dan interaksinya, lembaga-lembaga sosial, lembaga pendidikan, dan organisasi sosial desa, serta aparatur dan pamong desa. Secara lebih rinci potensi desa dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Potensi Fisik, Potensi fisik adalah potensi yang berkaitan dengan sumber daya alam yang ada di desa berupa :

- 1) Lahan, lahan tidak hanya sebagai tempat tumbuh tanaman, tetapi juga sebagai sumber bahan tambang dan mineral. Lahan memiliki jenis tanah yang menjadi media bagi tumbuhnya tanaman tertentu. Misalnya, jenis tanah aluvial cocok bagi tanaman padi, jagung, dan kacang, jenis tanah berkapur cocok bagi tanaman jati dan tebu. Pada lahan juga dimungkinkan terjadi eksploitasi bahan tambang seperti batu bara, batu kapur, pasir kuarsa, batu marmer, dan sebagainya.
- 2) Tanah mencakup berbagai macam kandungan kekayaan yang terdapat di dalamnya. misalnya kesuburan tanah, bahan tambang, dan mineral.
- 3) Air, pada umumnya desa memiliki potensi air yang bersih dan melimpah. Dari dalam tanah, air diperoleh melalui penimbaan, pemompaan, atau mata air. berfungsi sebagai pendukung kehidupan manusia. Air sangat dibutuhkan oleh setiap makhluk hidup untuk bertahan hidup dan juga aktivitas sehari-hari.
- 4) Iklim sangat erat kaitannya dengan temperatur dan curah hujan yang sangat mempengaruhi setiap daerah. Pada ketinggian tertentu, suatu desa menjadi maju karena kecocokan iklimnya bagi pengembangan tanaman dan pemanfaatan tertentu. Seperti perkebunan buah, tempat rekreasi, dan tempat peristirahatan sehingga corak iklim sangat mempengaruhi kehidupan masyarakat desa.
- 5) Lingkungan geografis, seperti letak desa secara geografis, luas wilayah, jenis tanah, tingkat kesuburan, sumber daya alam, dan penggunaan lahan sangat mempengaruhi pengembangan suatu desa.

- 6) Ternak berfungsi sebagai sumber tenaga dan sumber gizi bagi masyarakat pedesaan. Pada desa agraris ternak juga dapat menjadi investasi dan sumber pupuk.
 - 7) Manusia merupakan sumber tenaga dalam proses pengolahan lahan petani, sehingga manusia sebagai potensi yang sangat berharga bagi suatu wilayah untuk mengelolah sumber daya alam yang ada. Tingkat pendidikan, ketrampilan dan semangat hidup masyarakat menjadi faktor yang sangat menentukan dalam pembangunan desa.
2. Potensi Nonfisik, Potensi non fisik adalah segala potensi yang berkaitan dengan masyarakat desa dan tata perilakunya. Potensi non fisik lainnya adalah lembaga desa, aparatur desa, adat istiadat dan budaya. Suatu masyarakat desa yang hidup dalam waktu yang lama akan membentuk tata kehidupan tersendiri. Tata kehidupan akan dipengaruhi oleh kondisi alam wilayah desa itu sendiri. Adapun potensi desa non fisik tersebut antara lain:
- 1) Masyarakat desa cirinya memiliki semangat kegotongroyongan yang tinggi dalam ikatan kekeluargaan yang erat (*gemeinschaft*) merupakan landasan yang kokoh bagi kelangsungan program pembangunan dan merupakan kekuatan dalam membangun pedesaan.
 - 2) Lembaga dan Organisasi Sosial, lembaga atau organisasi sosial merupakan suatu badan perkumpulan yang membantu masyarakat desa dalam kehidupan sehari-hari, seperti :

- 3) Lembaga desa, seperti Badan Perwakilan Desa (BPD), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD), Tim Penggerak PKK, Rukun Warga (RW), Rukun Tetangga (RT), Karang Taruna dan lain-lain
- 4) Lembaga pendidikan, seperti sekolah, perpustakaan desa, kelompok pencipir, penyuluhan, simulasi, dan lain-lain.
- 5) Lembaga Kesehatan, seperti puskesmas, posyandu, dan BKIA.
- 6) Lembaga Ekonomi, seperti Koperasi Unit Desa (KUD), Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), Pasar Desa, dan lumbung desa.

2.2.3 Tujuan Pengembangan Potensi Lokal

Menurut Soleh (2017) Secara umum tujuan pengembangan potensi lokal adalah untuk mendorong terwujudnya kemandirian masyarakat Desa/Kelurahan melalui Pengembangan Potensi Unggulan dan Penguatan Kelembagaan serta Pemberdayaan Masyarakat Sedangkan secara khusus tujuan pengembangan potensi desa adalah:

- a) Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan pembangunan secara terbuka, demokratis dan bertanggung jawab;
- b) Mengembangkan kemampuan usaha dan peluang berusaha demi peningkatan pendapatan dan kesejahteraan Rumah Tangga Miskin.
- c) Membentuk dan mengoptimalkan fungsi dan peran Unit Pengelola Keuangan dan Usaha (UPKu) sebagai Lembaga Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat.
- d) Membentuk, memfasilitasi dan memberikan pembinaan Pokmas UEP terutama pada aspek kelembagaan dan pengembangan usaha.

- e) Mengembangkan potensi ekonomi unggulan Desa/Kelurahan yang disesuaikan dengan karakteristik tipologi Desa/Kelurahan.
- f) Mendorong terwujudnya keterpaduan peran dan kemitraan antar Dinas/ Instansi Provinsi dan Kabupaten/Kota maupun stakeholders lainnya sebagai pelaku dan fasilitator program

2.3 Desa Wisata

2.3.1 Pengertian Desa Wisata

Menurut Wiendu dalam (Nurini, 2016) desa wisata adalah suatu bentuk integrasi antara atraksi, akomodasi dan fasilitas pendukung yang disajikan dalam suatu struktur kehidupan masyarakat yang menyatu dengan tata cara dan tradisi yang berlaku. Pengembangan desa wisata sangat erat kaitannya dengan pengembangan masyarakat setempat sesuai dengan prinsip-prinsip pengembangan pariwisata berbasis komunitas atau masyarakat. Sedangkan menurut Demartoto, (2009:125), desa wisata atau pariwisata pedesaan adalah wilayah pedesaan yang memanfaatkan unsur-unsur yang ada di masyarakat dan berfungsi sebagai atribut produk wisata, menjadi suatu rangkaian aktivitas pariwisata yang terpadu. Sehingga desa tersebut mampu memenuhi segala kebutuhan perjalanan wisata, serta menyediakan berbagai fasilitas pendukungnya.

Menurut Ikaputa dalam (Herawati, 2011:168) desa wisata adalah merupakan suatu bentuk lingkungan permukiman yang sesuai dengan tuntutan wisatawan dalam menikmati, mengenal dan menghayati / mempelajari kekhasan

desa beserta segala daya tariknya. Sesuai pula dengan tuntutan kegiatan hidup masyarakatnya (mencakup kegiatan hunian, interaksi sosial, kegiatan adat setempat dan sebagainya), sehingga terwujud suatu lingkungan yang harmonis, rekreatif dan terpadu dengan lingkungannya. Sedangkan menurut Subagyo (Herawati, 2011:168) mendefinisikan desa wisata sebagai bentuk desa yang memiliki ciri khusus didalamnya, baik alam dan budaya serta berpeluang dijadikan komoditi bagi wisatawan. Wujud desa wisata itu sendiri, bahwa desa sebagai objek dan subyek pariwisata. Sebagai objek, merupakan tujuan kegiatan pariwisata, sedangkan sebagai subyek adalah sebagai penyelenggara, apa yang dihasilkan oleh desa akan dinikmati oleh masyarakatnya secara langsung dan peran aktif masyarakat sangat menentukan kelangsungan desa wisata itu sendiri.

Menurut Laporan Kajian Pengembangan Desa Wisata Dinas Pariwisata Yogyakarta (2014:2), suatu desa yang dapat dikembangkan sebagai desa wisata harus memiliki kriteria dan faktor pendukung yaitu:

- 1) Memiliki potensi produk yang khas dan daya tarik bagi wisatawan. Potensi yang dapat menarik minat wisatawan berkunjung antara lain potensi fisik/lingkungan alam, potensi kehidupan sosial budaya yang khas.
- 2) Memiliki dukungan ketersediaan sumber daya manusia lokal yang memadai untuk mendukung pengelolaan desa wisata. Karena tujuan utama pengembangan desa wisata adalah untuk memberdayakan masyarakat lokal, sehingga meningkatkan produktivitas dan ekonomi masyarakat.
- 3) Faktor peluang akses terhadap akses pasar, artinya bahwa dalam mengembangkan desa wisata membutuhkan jaringan yang luas salah satunya

melalui pasar atau industri pariwisata. Sehingga wisatawan akan lebih banyak yang tau.

- 4) Tersedia alokasi ruang untuk mengembangkan fasilitas pendukung, antara lain seperti homestay, area pelayanan umum, kesenian dan lain sebagainya. Hal tersebut untuk memungkinkan wisatawan yang ingin tinggal sementara waktu di desa wisata dan berinteraksi dengan masyarakat setempat.

Selain berkaitan dengan hal tersebut terdapat 2 (dua) konsep penting dalam komponen desa wisata yaitu (Hadiwijoyo, 2012:69) : Akomodasi, sebagian dari tempat tinggal para penduduk setempat dan atau unit-unit yang berkembang atas konsep tempat tinggal penduduk. Atraksi, seluruh kehidupan keseharian penduduk setempat beserta setting fisik lokasi desa yang memungkinkan berintegrasinya wisatawan sebagai partisipasi aktif seperti kursus, tari, bahasa, membatik, dan lain sebagainya yang spesifik.

Inskeep dalam (Dewi, dkk, 2013) mengatakan bahwa desa wisata merupakan bentuk pariwisata, yang sekelompok kecil wisatawan tinggal di dalam atau di dekat kehidupan tradisional atau di desa-desa terpencil dan mempelajari kehidupan desa dan lingkungan setempat. Nuryanti dalam (Dewi, dkk, 2013) mendefinisikan desa wisata merupakan suatu bentuk integrasi antara atraksi, akomodasi, dan fasilitas pendukung yang disajikan dalam suatu struktur kehidupan masyarakat yang menyatu dengan tata cara dan tradisi yang berlaku. Ditegaskan pula bahwa komponen terpenting dalam desa wisata, adalah (1) akomodasi, yakni sebagian dari tempat tinggal penduduk setempat dan atau unit-unit yang berkembang sesuai dengan tempat tinggal penduduk, dan (2) atraksi, yakni seluruh

kehidupan keseharian penduduk setempat beserta lokasi desa yang memungkinkan berintegrasinya wisatawan sebagai partisipan aktif, seperti kursus tari, bahasa, lukis, dan hal-hal lain yang spesifik.

Pariwisata merupakan lahan dan sumber pendapatan yang potensial. Pengelolaan pariwisata harus tepat dan profesional karena rentan terhadap segala perubahan sosial politik yang terjadi di masyarakat baik regional, nasional maupun global. Pengembangan kawasan pariwisata mempunyai peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat dan program pembangunan pemerintah. (Zulfanita & Setiawan, 2015:2)

2.3.2 Tujuan Desa Wisata

Pembangunan desa wisata menurut Hadiwijoyo (2012: 69) bertujuan untuk:

- 1) Mendukung program pemerintah dalam pembangunan kepariwisataan dengan menyediakan obyek wisata alternatif.
- 2) Menggali potensi desa untuk pembangunan masyarakat sekitar desa wisata.
- 3) Memperluas lapangan kerja dan lapangan berusaha bagi penduduk desa, sehingga bisa meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa, sehingga akan terjadi pemerataan ekonomi di desa.
- 4) Mendorong orang-orang kota yang secara ekonomi relatif lebih baik, agar senang pergi ke desa untuk berekreasi.
- 5) Menimbulkan rasa bangga bagi penduduk desa untuk tetap tinggal di desanya, sehingga mengurangi urbanisasi.
- 6) Mempercepat pembauran antara orang-orang non pribumi dengan penduduk pribumi.
- 7) Memperkokoh persatuan bangsa, dapat mengatasi disintegrasi.

Dalam jurnal internasional (Chee Hua Chin, Susan Su-Zhuang Thian, 2017:5) menyatakan

it is important for a tourism destination to achieve competitive advantage by holding a certain resource which is difficult to be imitated by their rivals. The forces of competitive advantages include the workforce skills, the infrastructure of the rural tourism sites and the quality management to achieve both supply-competency and communicational-competency.

Yang artinya tujuan pariwisata untuk mencapai keunggulan kompetitif dengan memegang sumber daya tertentu yang sulit untuk ditiru oleh saingan mereka. Pasukan keunggulan kompetitif meliputi keterampilan tenaga kerja, infrastruktur situs wisata pedesaan dan manajemen mutu untuk mencapai kedua pasokan-kompetensi dan komunikasi yang kompetensi.

Merujuk pada pendapat Hadiwijoyo diatas dapat ditegaskan bahwa tujuan pengembangan desa wisata adalah untuk menggali potensi suatu daerah untuk kepentingan masyarakat serta memberikan lapangan kerja untuk kesejahteraan hidup masyarakat desa.

2.4 Kemandirian

2.4.1 Pengertian Kemandirian Ekonomi

Hill dan Holmbeck dalam (Collins, W.A., Gleason, T., & Sesma, 1997) mendefinisikan kemandirian sebagai berikut :

"Autonomy refers not to freedom from others (e.g., parents), but freedom to carry out actions on one's own behalf while maintaining appropriate connections to significant others".

Lebih lanjut, Burnadib dalam (Mu'tadin, 2002) mendefinisikan kemandirian sebagai suatu keadaan ketika seseorang memiliki hasrat bersaing untuk maju demi kebaikan dirinya, mampu mengambil keputusan dan inisiatif untuk mengatasi masalah yang dihadapi, memiliki kepercayaan diri dalam mengerjakan tugas tugasnya, dan bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya.

Kemandirian berasal dari kata "*independence*" yang diartikan sebagai suatu kondisi dimana seseorang tidak tergantung kepada orang lain dalam menentukan keputusan dan adanya sikap percaya diri (Chaplin, 1996:105). Kemandirian (self-reliance) adalah kemampuan untuk mengelola semua yang dimilikinya sendiri yaitu mengetahui bagaimana mengelola waktu, berjalan dan berfikir secara mandiri, disertai dengan kemampuan dalam mengambil resiko dan memecahkan masalah. Dengan kemandirian tidak ada kebutuhan untuk mendapat persetujuan orang lain ketika hendak melangkah menentukan sesuatu yang baru. Individu yang mandiri tidak dibutuhkan yang detail dan terus menerus tentang bagaimana mencapai produk akhir, ia bisa berstandar pada diri sendiri. Kemandirian berkenaan dengan pribadi yang mandiri, kreatif dan mampu berdiri sendiri yaitu memiliki kepercayaan diri yang bisa membuat seseorang mampu sebagai individu untuk beradaptasi dan mengurus segala hal dengan dirinya sendiri (Parker, 2006:226).

Kemandirian ditandai dengan kemampuan masyarakat memikirkan pemenuhan kebutuhannya dan berinovasi terhadap lingkungan atau melakukan usaha untuk perbaikan. (Yefni, 2018:54). Kemampuan berdaya mempunyai arti yang sama dengan kemandirian masyarakat. Terkait dengan program pembangunan, bahwa tujuan yang ingin dicapai adalah untuk membentuk individu dan masyarakat menjadi mandiri. Kemandirian tersebut meliputi kemandirian berpikir, bertindak dan mengendalikan apa yang mereka lakukan. Kemandirian masyarakat merupakan suatu kondisi yang dialami oleh masyarakat yang ditandai dengan kemampuan memikirkan, memutuskan serta melakukan sesuatu yang dipandang tepat demi mencapai pemecahan masalah-masalah yang dihadapi

dengan mempergunakan daya kemampuan yang dimiliki. Daya kemampuan yang dimaksud adalah kemampuan kognitif, konatif, psikomotorik dan afektif serta sumber daya lainnya yang bersifat fisik/material. Kemandirian masyarakat dapat dicapai tentu memerlukan sebuah proses belajar. Masyarakat yang mengikuti proses belajar yang baik, secara bertahap akan memperoleh daya, kekuatan atau kemampuan yang bermanfaat dalam proses pengambilan keputusan secara mandiri. Berkaitan dengan hal ini, Sumodiningrat (2000:82) menjelaskan bahwa keberdayaan masyarakat yang ditandai adanya kemandiriannya dapat dicapai melalui proses pemberdayaan masyarakat. Keberdayaan masyarakat dapat diwujudkan melalui partisipasi aktif masyarakat yang difasilitasi dengan adanya pelaku pemberdayaan. Sasaran utama pemberdayaan masyarakat adalah mereka yang lemah dan tidak memiliki daya, kekuatan atau kemampuan mengakses sumberdaya produktif atau masyarakat terpinggirkan dalam pembangunan. Tujuan akhir dari proses pemberdayaan masyarakat adalah untuk memandirikan warga masyarakat agar dapat meningkatkan taraf hidup keluarga dan mengoptimalkan sumberdaya yang dimilikinya.

Ukuran kemajuan dan kemandirian suatu bangsa tidak dapat hanya berupa pendapatan perkapita, atau besar kecilnya utang, tetapi lebih mendasar lagi menyangkut manusianya (Kartasasmita, 1996:63). Dalam penggunaannya di masa sekarang istilah “ekonomi” memiliki beberapa makna. Pertama, istilah ekonomi kadang digunakan untuk merujuk pada cara melakukan tindakan, seperti misalnya pada kata “*economically*” (bertindak secara hemat). Dalam artian ini, ekonomi berarti efisiensi, pengerahan upaya minimal (dengan hasil maksimal) dan adanya

adaptasi terhadap cara-cara yang digunakan untuk mencapai tujuan. Kedua, istilah “ekonomi” kadang juga digunakan untuk merujuk pada kegiatan-kegiatan yang dimaksudkan untuk mendapatkan kebutuhan yang dibutuhkan atau diinginkan (misalnya dalam produksi). Makna ini sering kali disampaikan dengan istilah “*provisioning*” (yaitu pengadaan barang dan jasa). Ketiga, istilah “ekonomi” adalah merujuk pada institusi-institusi dalam pasar adalah perwujudan yang paling menyolok dari upaya pencapaian efisiensi dalam kegiatan-kegiatan yang ditujukan untuk mendapatkan barang dan jasa yang menjadi kebutuhan kita (Caporaso, James A, 2008:36).

Ekonomi yang mandiri, dipahami sebagai ketidaktergantungan kepada pihak lain (*dependency*). Ketidaktergantungan tidak berarti keterisolasian dan tidak berarti tak mengenal adanya saling ketergantungan (*interdependency*). Maka tidak semua negara memiliki potensi yang sama, maka ada kebutuhan untuk saling mengisi dan kebutuhan ini menciptakan perdagangan, dan dengan demikian mengakibatkan adanya lembaga yang disebut pasar. (Kartasasmita, 1996). Masyarakat yang mandiri sebagai partisipan berarti terbukanya ruang dan kapasitas mengembangkan potensi-kreasi, mengontrol lingkungan dan sumberdayanya sendiri, menyelesaikan masalah secara mandiri, dan ikut menentukan prosespolitik di ranah negara. Masyarakat ikut berpartisipasi dalam proses pembangunan dan pemerintahan (Hilman, 2018)

Melihat definisi kemandirian dan ekonomi, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa kemandirian ekonomi adalah suatu sikap dimana orang dapat mengatur, memenuhi, dan tidak tergantung pada kehendak orang lain dalam

kegiatan yang ditujukan untuk mendapatkan barang dan jasa yang menjadi kebutuhannya

2.5 Penelitian Relevan

Hasil penelitian Hesty Pratiwi (2017) yang berjudul Strategi Pemberdayaan Masyarakat Melalui Desa Wisata Mandiri di Desa Wanurejo Kecamatan Borobudur Kabupaten Magelang yang menunjukkan strategi pemberdayaan masyarakat melalui desa wisata mandiri di Desa Wanurejo dilaksanakan melalui berbagai pelatihan seperti pelatihan blangkon dan pelatihan seni tari di Sanggar Avadana, strategi juga dilakukan dengan promosi yang dilaksanakan melalui pagelaran rakyat atau yang dikenal dengan gelar budaya setiap tanggal 17 Mei yang juga diperingati sebagai hari jadi Desa Wanurejo, selain itu Desa Wanurejo juga menjalin kerjasama dengan pihak-pihak tertentu yang mendukung kegiatan pariwisata desa. Faktor pendorong dalam pelaksanaan strategi pemberdayaan masyarakat yaitu letak Desa Wanurejo yang strategis sebagai pintu gerbang masuknya Candi Borobudur, selain itu pelaku seni yang masih mempertahankan dan mengembangkan budaya dan seni tradisional serta didukung dengan tingkat partisipasi masyarakat terhadap pemberdayaan cukup tinggi. Selain itu beberapa faktor yang menghambat strategi pemberdayaan dalam desa wisata yaitu munculnya mafia pariwisata, semakin besarnya sifat egosentris yang muncul pada individu untuk memperoleh keuntungan sendiri, dan fasilitas pelaku wisata yang masih sangat terbatas.

Penelitian Rizqi Choironi (2018) yang berjudul Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Potensi Lokal Melalui Pengolahan Limbah Cangkang Kerang di PKBM

Kridatama Desa Sendang Sikucing Kecamatan Rowosari Kabupaten Kendal menunjukkan Proses pemberdayaan masyarakat berbasis potensi lokal di PKBM Kridatama melalui tahap pemberdayaan yaitu pembentukan perilaku menuju sadar dan peduli strategi yang digunakan dengan cara mengangkat dan mengembangkan kemampuan masyarakat dalam memanfaatkan pengetahuan dan keterampilan lebih lanjut dalam rangka memperbaiki taraf kehidupan. Pemberian keterampilan dan wirausaha yaitu pembuatan kerajinan dari limbah cangkang kerang berupa Bros, Boneka, Vas Bunga dan Vigura.

Penelitian Novie Isteria Hidayah (2017) yang berjudul Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengembangan Desa Wisata Jatimulyo, Girimulyo, Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta menunjukkan bahwa kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan Desa Wisata Jatimulyo antara lain: Bantuan modal, bantuan dari PNPM Mandiri Pariwisata; Bantuan pembangunan prasarana, meliputi gardu pandang, mushola, kamar mandi, joglo, ruang aula, permainan anak, panggung teater, dan lain-lain. Namun sebagian dananya berasal dari swadaya masyarakat; Bantuan pendampingan, pelatihan pemandu wisata, manajemen wisata, pembukuan tentang wisata, struktur organisasi, pengelolaan obyek wisata goa, bahasa asing, kuliner, dan manajemen pengelolaan wisata pedesaan; Penguatan kelembagaan, pokdarwis dan kesekretariatan pengelola Desa Wisata Jatimulyo, RT, RW, pemerintah Desa Jatimulyo, Kecamatan Girimulyo, pemerintah daerah kabupaten Kulon Progo dan Provinsi DIY dan desa wisata lain; Penguatan kemitraan, antara masyarakat, pemerintah, dan swasta yakni pemerintahan Desa Jatimulyo, Dinas Pariwisata Kabupaten Kulon Progo,

perguruan tinggi di DIY, organisasi di bidang rescue, PLN, Indosat, dan lainnya. Faktor pendukung diantaranya adalah potensi wisata yang melimpah, semangat dan respon positif dari masyarakat, serta bantuan dari PNPM Mandiri Pariwisata. Sedangkan faktor penghambat yang muncul yakni kualitas SDM yang masih rendah dan kurang profesional, belum ada peraturan dan kebijakan yang mengatur tentang desa wisata khususnya Desa Wisata Jatimulyo, dan pencatatan kepariwisataan yang belum jelas.

2.6 Kerangka Pikir

Keanekaragaman pada setiap daerah memiliki berbagai macam ciri khas yang dimiliki oleh setiap daerah. Dari setiap ciri khas daerah tersebut merupakan sebuah potensi yang dapat dimanfaatkan. Potensi menurut Soleh (2017) dibedakan menjadi dua, yaitu potensi fisik berupa tanah, air, iklim, lingkungan geografis, binatang ternak, sumber daya manusia, dan potensi nonfisik berupa masyarakat dengan corak dan interaksinya, lembaga-lembaga sosial. Potensi tersebut dapat dimanfaatkan oleh desa dan didukung oleh kebijakan pemerintan tentang UU Desa.

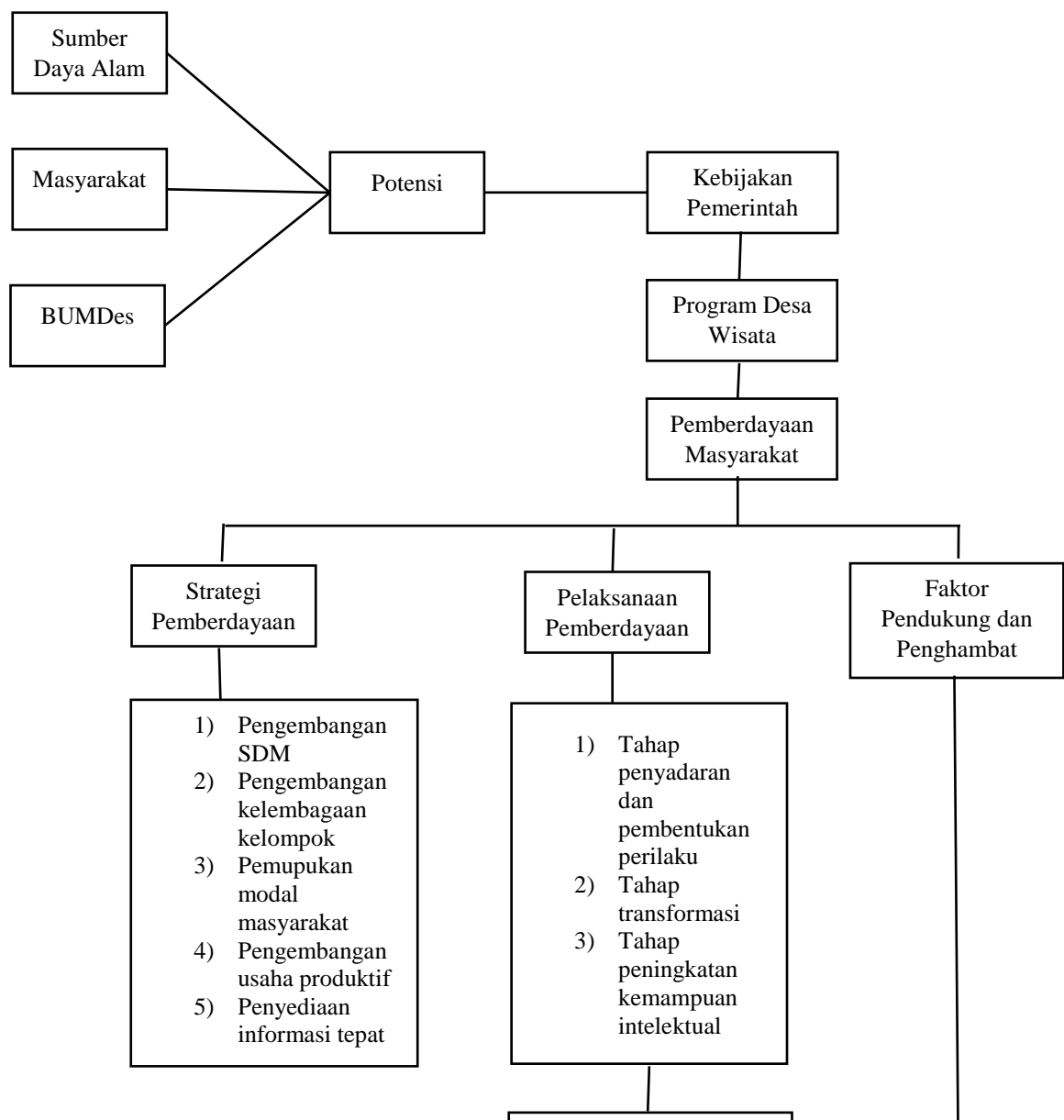
Pariwisata merupakan salah satu bentuk industri yang sedang banyak dikembangkan oleh pemerintah di berbagai daerah. Hal tersebut dikarenakan pariwisata memiliki prospek yang tinggi dalam peningkatan pendapatan suatu daerah. Salah satu bentuk pariwisata yang sedang banyak berkembang salah satunya yaitu desa wisata, saat ini masyarakat sangat menggemari desa wisata sebagai daerah tujuan wisata mereka, karena mencari tempat yang masih asri dengan potensi alam dan ditambah dengan keunikan masing-masing daerah yang tentu berbeda-beda, terutama dalam kebudayaannya. Pengembangan desa wisata

menjadi salah satu langkah dalam upaya pemberdayaan masyarakat lokal. Pemberdayaan ekonomi masyarakat dapat terwujud apabila masyarakat lokal mampu mengambil peluang dan memanfaatkan potensi yang ada disekitarnya untuk dikembangkan secara berkesinambungan guna memperoleh pendapatan dan memperluas kesempatan kerja, dilain sisi juga dengan tujuan masyarakat dapat hidup mandiri dan tidak lagi ketergantungan.

Strategi pemberdayaan menurut Ismawan dalam (Priyono & Pranarka, 1996:170) menetapkan 5 (lima) program strategi pemberdayaan yaitu: 1) Pengembangan sumberdaya manusia, yang meliputi berbagai macam pendidikan dan latihan baik untuk anggota maupun pengurus kelompok, mencakup pendidikan dan latihan keterampilan pengelolaan kelembagaan kelompok, teknis produksi dan usaha; 2) Pengembangan kelembagaan kelompok, yang antara lain meliputi bantuan menyusun mekanisme organisasi, kepengurusan, administrasi, dan peraturan rumah tangga; 3) Pemupukan modal masyarakat, menghubungkan kelompok dengan lembaga-lembaga keuangan setempat untuk mendapatkan manfaat bagi pemupukan modal lebih lanjut; 4) Pengembangan usaha produktif, antara lain peningkatan usaha produktif (dan jasa), pemasaran yang disertai dengan kegiatan studi kelayakan usaha dan informasi pasar; 5) Penyediaan informasi tepat guna, yaitu berupa exposure program, penerbitan buku, dan majalah yang dapat memberikan masukan yang mendorong inspirasi ke arah inovasi usaha lebih lanjut.

Kegiatan pemberdayaan masyarakat terdapat pelaksanaan pemberdayaan masyarakat yaitu tahap kesadaran, tahap transformasi, dan tahap pengayaan. Kegiatan pemberdayaan masyarakat dapat berjalan dengan baik apabila didukung

oleh adanya faktor yang mendukung pemberdayaan masyarakat. Output atau hasil pemberdayaan masyarakat yaitu berupa keberhasilan yaitu kemandirian dalam bidang ekonomi, sosial, dan budaya.





Gambar 2.1 Skema Kerangka Berfikir

BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

5.1.1 Strategi pemberdayaan masyarakat berbasis potensi lokal Candi Plaosan melalui program desa wisata untuk kemandirian ekonomi masyarakat di Desa Bugisan yaitu melalui lima tahap yaitu:

5.1.1.1 Pengembangan sumberdaya manusia yang dilakukan di Desa Wisata Bugisan yaitu dengan mengikutsertakan masyarakat ke dalam pelatihan, seminar dan studi banding.

5.1.1.2 Pengembangan kelembagaan kelompok yang ada di Desa Wisata Bugisan yaitu dengan adanya BUMDes Rukun Santoso berperan dalam memberdayakan masyarakat melalui beberapa unit usaha diantaranya paseban candi kembar, *car free day*, bank sampah, kantin PKK, simpan pinjam perdagangan. Pengelolaan Desa Wisata BUMDes bekerjasama dengan Pokdarwis dalam pengembangan kepariwisataan.

5.1.1.3 Pengembangan usaha produktif, pengembangan usaha yang dilakukan BUMDes untuk desa wisata yaitu melalui unit usaha paseban candi kembar. Unit usaha produksi yang ada di masyarakat diantaranya kerajinan kayu, kerajinan bambu, kerajinan tas, sablon kaos, produksi kuliner tradisional seperti ampyang, emping, bakpia, jahe instan, produksi dalam bidang jasa yaitu guide dan instruktur outbond.

5.1.1.4 Pengembangan modal masyarakat yaitu pengembangan Desa Wisata Bugisan berasal dari dana desa, pendapatan asli desa, dana aspirasi dan pihak ketiga. Selain modal berupa dana, Desa Wisata Bugisan juga mengandalkan modal sosial yaitu dari Universitas Gadjah Mada dan ISI Surakarta yang berperan menjadikan Desa Wisata Bugisan menjadi terkenal.

5.1.1.5 Penyediaan informasi tepat guna yaitu untuk mempublikasikan Desa Wisata Bugisan yaitu melalui sosial media, website, brosur dan pamflet untuk memasarkan dan mempublikasikan Desa Wisata Bugisan agar dikenal luas.

5.1.2 Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat berbasis potensi lokal Candi Plaosan melalui program desa wisata untuk kemandirian ekonomi masyarakat di Desa Bugisan yaitu melalui tiga tahap yaitu pertama tahap kesadaran yaitu dengan kegiatan sosialisasi dari pemerintah desa kepada seluruh elemen masyarakat hingga lapisan terkecil yaitu RT. Kedua, yaitu tahap transformasi yaitu terjadinya perubahan kemandirian dalam masyarakat, masyarakat mampu mengelola festival candi kembar sendiri tanpa dibimbing oleh ISI Surakarta, lingkungan Desa Wisata Bugisan menjadi bersih dan lebih tertata karena masyarakat sadar wisata, masyarakat mendapat penghasilan tambahan dari paseban candi kembar dan *car free day* adanya inovasi kuliner papaya California . Ketiga, tahap pengayaan yaitu terdapat peningkatan kemampuan intelektual masyarakat sudah mandiri dalam kegiatan festival candi kembar, inovasi kuliner papaya California dan perencanaan pembangunan balai budaya untuk mewadahi kesenian Desa Wisata Bugisan

5.1.3 Faktor Pendukung dan Penghambat pemberdayaan masyarakat berbasis potensi lokal Candi Plaosan melalui program Desa Wisata untuk kemandirian ekonomi masyarakat di Desa Bugisan yaitu terdapat faktor pendukung secara internal berupa partisipasi masyarakat yang baik dalam pengembangan desa wisata. Faktor pendukung secara eksternal berupa dukungan dan kerjasama dari berbagai pihak dalam pengembangan desa wisata seperti Dinas Pariwisata, PT. Taman Wisata Candi, Universitas Gadjah Mada, ISI Surakarta. Faktor penghambat dalam pemberdayaan masyarakat yaitu masyarakat masih ada yang belum sadar dengan desa wisata.

5.1.4 Keberhasilan pemberdayaan masyarakat berbasis potensi lokal Candi Plaosan melalui program Desa Wisata untuk kemandirian ekonomi masyarakat di Desa Bugisan yaitu keberhasilan ekonomi produksi dari tahun ke tahun semakin meningkat dan pendapatan masyarakat meningkat dengan adanya desa wisata Bugisan. Keberhasilan sosial yaitu dengan kerjasama yang baik dengan berbagai pihak seperti Universitas Gadjah Mada, ISI Surakarta, PT Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan, dan Ratu Boko, Balai Pelestarian dan Cagar Budaya, Dinas Pariwisata, Kebudayaan, dan Pemuda Kabupaten Klaten. Keberhasilan budaya ditandai dengan pelestarian budaya asli yang ada di Desa Wisata Bugisan seperti gejog lesung, pringsedapur, karawitan, srandul, jathilan, tari candi plaosan.

5.2 Saran

5.2.1 Berdasarkan hasil temuan dan fakta dari strategi pemberdayaan masyarakat berbasis potensi lokal Candi Plaosan melalui program Desa Wisata untuk kemandirian ekonomi masyarakat di Desa Bugisan peneliti menyarankan dalam pengembangan sumber daya manusia agar diadakan lebih banyak pelatihan untuk masyarakat Desa Wisata Bugisan. Kedua yaitu lebih banyak diadakan pertemuan dengan pelaku usaha kecil menengah agar saling belajar satu sama lain terkait pengembangan usaha produksi. Ketiga yaitu dalam strategi penyediaan informasi tepat guna perbaikan terhadap website yang diblokir karena sangat penting terhadap publikasi Desa Wisata Bugisan.

5.2.2 Berdasarkan hasil temuan dan fakta dari pelaksanaan pemberdayaan masyarakat berbasis potensi lokal Candi Plaosan melalui program Desa Wisata untuk kemandirian ekonomi masyarakat di Desa Bugisan pada tahap pengayaan lebih difokuskan lagi terhadap rencana pembangunan yaitu pembuatan balai budaya karena apabila berhasil akan menambah pengembangan desa wisata.

5.2.3 Berdasarkan hasil temuan dan fakta dari faktor pendukung dan penghambat pemberdayaan masyarakat berbasis potensi lokal Candi Plaosan melalui program Desa Wisata untuk kemandirian ekonomi masyarakat di Desa Bugisan untuk lebih berusaha lagi merangkul masyarakat yang belum sadar wisata.

DAFTAR PUSTAKA

- Ani, F. dkk. (2017). Applying Empowerment Approach In Community Development. *Jurnal Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, Johor, Malaysia*, 506–508.
- Anwas, O. (2014). *Pemberdayaan Masyarakat di Era Global*. Bandung: Alfabeta.
- Bancin, M. (2011). Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan (Studi Kasus: Bandung Barat). *Jurnal Perencanaan Wilayah Dan Kota*, 22(3), 182.
- Bannet, M. I. J. (2008). *Encyclopedia of Race, Ethnicity, and Society Community Empowerment*. 2.
- Caporaso, James A, dan D. P. L. (2008). *Teori-Teori Ekonomi Politik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Chaplin. (1996). *Kamus Lengkap Psikologi*. Jakarta: Rajawali Press.
- Chee Hua Chin, Susan Su-Zhuang Thian, M. C. Lo. (2017). Community's Experiential Knowledge On The Development Of Rural Tourism Competitive Advantage: A Study On Kampung Semadang – Borneo Heights, Sarawak. *Tourism Review*, 72(2). <https://doi.org/10.1108/TR-12-2016-0056>
- Collins, W.A., Gleason, T., & Sesma, A. J. (1997). *Internalization, Autonomy, and Relationships: Development during Adolescence*. 78–79.
- Damanaik & Janianton. (2013). *Pariwisata Indonesia (Antara peluang dan Tantangan)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Demartoto, A. (2009). *Pembangunan Pariwisata Berbasis Masyarakat*. Surakarta: Seblas Maret University Press.
- Desmawati, L., Rifai, A., & Mulyono, S. E. (2015). Penanggulangan Masyarakat Miskin Kota Rawan Kriminalitas Melalui Pemberdayaan Masyarakat di Jalur Pendidikan Nonformal di Kota Semarang. *Journal of Nonformal Education Semarang State University*, 1(1), 85.
- Dewi, M. H. U., Fandeli, C., & Baiquni, M. (2013). Pengembangan Desa Wisata Berbasis Partisipasi Masyarakat Lokal Di Desa Wisata Jatiluwuh Tabanan, Bali. *Kawistara*, 3(2), 117–226.
<https://doi.org/https://doi.org/10.22146/kawistara.3976>
- Dwiyanto, B. S., J. (2013). Pemberdayaan Masyarakat Dan Pengembangan Kapasitas Dalam Penanggulangan Kemiskinan Melalui Pnpm Mandiri Perkotaan. *Jurnal Maksipreneur*, 3(1), 37.
- Fandeli, C. (1995). *Dasar-Dasar Manajemen Kepariwisata Alam*. Yogyakarta: Liberty.
- Hadiwijoyo, S. (2012). *Perencanaan Pariwisata Perdesaan Berbasis Masyarakat*

(*Sebuah Pendekatan Konsep*). Yogyakarta: Graha Ilmu.

- Hajaroh, Laela & Mulyono, S. E. (2012). Partisipasi Anggota Kelompok Swadaya Masyarakat Dalam Pengembangan Desa Wisata Melalui Badan Keswadayaan Masyarakat Di Kelurahan Kandri Kota Semarang. *Journal of Non Formal Education and Community Empowerment*, 1(2), 17–24. Retrieved from <http://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/jnfc%0apengelolaan>
- Haris, A. (2014). Memahami Pendekatan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pemanfaatan Media. *Jurnal Jupiter*, 13(2), 52.
- Herawati, T. (2011). Model Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Penanggulangan Kemiskinan Melalui Pengembangan Desa Wisata di Depok. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 10(2), 168–175.
- Hilman, Y. A. (2018). Kemandirian Ekonomi Komunitas Melalui Program Pemberdayaan Model Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Berbasis Komunitas Universitas Muhammadiyah Ponorogo. *Jurnal Sosial Politik Humaniora*, 6(1), 45.
- Hutomo, M. (2000). *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Bidang Ekonomi: Tinjauan Teoritik dan Implementasi*. Jakarta: Bappenas.
- Kartasasmita, G. (1996). *Pembangunan untuk Rakyat: Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan*. Jakarta: CIDES.
- Kusnandi. (2006). *Filosofi Pemberdayaan Masyarakat Pesisir*. Bandung: Humaniora.
- Lord, J., H. (1993). The Process of Empowerment: Implications for Theory and Practice. *Canadian Journal of Community Mental Health*, 3–4.
- Malik, A., & Mulyono, S. E. (2017). *Pengembangan Kewirausahaan Berbasis Potensi Lokal melalui Pemberdayaan Masyarakat*. 1(1), 87–101.
- Mardikanto, Totok & Soebianto, P. (2017). *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Moleong, L. J. (2006). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Mu'arifuddin, Mulyono, S. E., & Malik, A. (2016). Analisis Kebutuhan Pengembangan Desa Wisata Batik Kecamatan Lasem Kabupaten Rembang. *Journal of Nonformal Education*, 2(1), 58.
- Mu'tadin, Z. (2002). *Pengantar Pendidikan dan Ilmu Perilaku Kesehatan*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Mubyarto. (2010). *Membangun Sistem Ekonomi*. Yogyakarta: BPFE Yogyakarta.
- Mulyadi, Muhammad. (2016). Peran Pemerintah Dalam Mengatasi Pengangguran dan Kemiskinan Dalam Masyarakat. *Jurnal Kajian*, 21(3), 224.
- Mulyono, S. E. (2017). *Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat*. Yogyakarta: Penerbit Ombak.

- Noor, Martadani. (2018). *Model Pemberdayaan Potensi Lokal dan Pengembangan Desa Wisata Brayut*. 2–3.
- Noor, Munawar. (2011). Pemberdayaan Masyarakat. *Jurnal Ilmiah*, 1(2), 96.
- Nurini. (2016). Pemberdayaan Masyarakat Desa Wisata Mergosari , Kecamatan Limbangan , Kabupaten Kendal Berbasis Potensi Lokal. *Community Empowerment*, 2(2), 61–70.
- Parker, D. (2006). *Menumbuhkan Kemandirian dan Harga Diri Anak*. Jakarta: Prestasi Pustakarya.
- Pingkan Aditiawati, Dea Indriani Astuti, Gede Suantika, T. M. S. (2016). Pengembangan Potensi Lokal Di Desa Panawangan Sebagai Model Desa Vokasi Dalam Pemberdayaan Masyarakat Dan Peningkatan Ketahanan Pangan Nasional. *Jurnal Sositologi*, 15(1), 60.
- Prastowo, A. (2011). *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan Penelitian*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Prijono, O.S. & Pranarka, A. M. (1996). *Pemberdayaan: Konsep, Kebijakan dan Implementasi*. Jakarta: CSIS.
- Rifa'i RC Achmad. (2008). *Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pendidikan Nonformal*. Semarang: UNNES Press.
- Sangadji, E. M., & S. (2010). *Metodologi Penelitian Pendekatan Praktis dalam Penelitian*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Satori, D., & R. (2011). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Soleh, A. (2017). Strategi Pengembangan Potensi Desa. *Jurnal Sungkai*, 5(1), 32–52.
- Soleh, C. (2014). *Dialektika Pembangunan Dengan Pemberdayaan*. Bandung: Fokus Media.
- Sugiyono. (2015). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Suhaimi, A. (2016). *Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat Konsep Pembangunan Partisipatif Wilayah Pinggiran dan Desa*. Yogyakarta: Deepublish.
- Suharto, E. (2009). *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Bandung: Refika Aditama.
- Sulistiyani, A. T. (2004). *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Suminar, T., Kisworo, B., & Utsman. (2019). *Model of Women Empowerment of Samin Community through Training on Social Entrepreneurship Based on Local Culture*. 293(Nfeic 2018), 137–145. <https://doi.org/10.2991/nfeic-18.2019.29>
- Sumodiningrat, G. (2000). *Visi dan Misi pembangunan Pertanian Berbasis Pemberdayaan*. Yogyakarta: IDEA.

- Sutarto, J. (2008). *Identifikasi Kebutuhan dan Sumber Belajar Pendidikan Nonformal*. Semarang: UNNES Press.
- Sutarto, J., Mulyono, S. E., Nurhalim, K., & Pratiwi, H. (2018). *Model Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pelatihan Kecakapan Hidup Berbasis Keunggulan Lokal Desa Wisata Mandiri Wanurejo Borobudur Magelang*. 35, 27–40.
- Sutawa, G. K. (2012). *Issues on Bali Tourism Development and Community Empowerment to Support Sustainable Tourism Development*. 4(Icsmed), 413–422. [https://doi.org/10.1016/S2212-5671\(12\)00356-5](https://doi.org/10.1016/S2212-5671(12)00356-5)
- Sutikno, Soedjono E. Setiadi., Rumiati, A. Tuti., & Trisunarno, L. (2010). Pemilihan Program Pengentasan Kemiskinan Melalui Pengembangan Model Pemberdayaan Masyarakat Dengan Pendekatan Sistem. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 11(1), 136.
- Tila'ar, H. A. . (1997). *Pengembangan Sumber Daya Manusia Dalam Era Globalisasi : Visi, Misi, Dan Program Aksi Pendidikan Dan Pelatihan Menuju 2020*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Tri Suminar, Joko Raharjo, M. (2016). Peran Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat dalam Menanggulangi Kemiskinan Melalui Pendidikan Nonformal di Jawa Tengah. *Journal of Nonformal Education Semarang State University*, 2(1), 28–29.
- Tukasno. (2013). Evaluasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (Pnpm-Mpd) Melalui Proses Pengembangan Kapasitas (Studi Di Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur. *Jurnal Manajemen Dan Bisnis*, 3(2), 183.
- Usman, S. (2008). *Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Victorino, D. (2004). *Global Responsibility and Local Knowledge System*. 5.
- Vitasurya, V. R. (2016). *Local Wisdom for Sustainable Development of Rural Tourism , Case on Kalibiru and Lopati Village , Province of Daerah Istimewa Yogyakarta*. 216(October2015),97–108. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.12.014>
- Wibowo, A. R., & Mulyono, S. E. (2014). *Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pelatihan Budidaya Cacing*. 54–66.
- Widiasih, A., Suminar, T. (2015). Monitoring Dan Evaluasi Program Pelatihan Batik Brebesan (Studi Di Mitra Batik Desa Bentar Kabupaten Brebes). *Journal of Nonformal Education*, 1(1), 90. Retrieved from <http://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/jne>
- Widiyanti, S. (2012). Pemberdayaan Masyarakat Pendekatan Teoritis. *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial*, 1(1), 88.
- Yefni. (2018). Analisis Model Pemberdayaan Masyarakat. *Jurnal Masyarakat Madani*, 3(2), 42–61.

- Yogyakarta, D. P. (2014). *Kajian Pengembangan Desa Wisata di DIY*. Yogyakarta: Dinas Pariwisata DIY.
- Yulong Li & Caroline Hunter. (2015). Community involvement for sustainable heritage tourism: a conceptual model. *Journal of Cultural Heritage Management and Sustainable Development*, 5(3), 248–262.
- Zulfanita & Setiawan, B. (2015). Pengembangan desa wisata jatimalang berbasis industri kreatif. *ABDIMAS*, 19(1), 1–8.